



LAPORAN KINERJA

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2025

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan secara periodik. Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghasilkan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan.

Capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan dengan merujuk pada target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada Tahun 2025 angka rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mencapai 106,95 persen. Hingga akhir 2025, penyerapan anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mencapai 88,41 persen. Selanjutnya laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan guna meningkatkan kinerja secara lebih optimal pada tahun yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan hingga penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas laporan kinerja selanjutnya.

Jakarta, Januari 2026

Direktur Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan



Dr. Ali Said MA

NIP. 196808291991121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	4
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	5
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	8
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Visi dan Misi BPS.....	15
2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 2025-2029..	16
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025	17
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	19
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025.....	22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025	27

3.2 Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra	40
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	43
3.3.1. Output yang sudah dihasilkan apa saja per prioritas	43
3.3.2. Kendala, Solusi, dan Rencana tindak lanjut per prioritas	49
3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	51
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran	53
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	18
Tabel 2.3 Perubahan Anggaran BPS Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025 (dalam ribu rupiah)	23
Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2023-2025	30
Tabel 3.2 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas Tahun 2025 menurut Monitoring Capaian Kinerja per Triwulan	33
Tabel 3.3 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas Tahun 2025 menurut Dokumen Notula Monitoring Capaian Renstra Tahun 2025	35
Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menurut Monitoring Capaian Kinerja per Triwulan	37
Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menurut Dokumen Notula Monitoring Capaian Renstra 2025	38
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 terhadap Target Renstra	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2021-2025	5
Gambar 2 Persentase Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Menurut Jenjang Pendidikan, 2025	6
Gambar 3 Persentase Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Menurut Jenis Jabatan, 2025	7
Gambar 4 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023-2025 (persen)	27
Gambar 5 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dengan Rata-rata Capaian Direktorat di Kedeputian Bidang Statistik Sosial	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	63
Lampiran 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	67
Lampiran 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	68
Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025	69
Lampiran 5 Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025.....	70
Lampiran 6 Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	71
Lampiran 7 Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	73
Lampiran 8 Alokasi Anggaran Belanja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025	78
Lampiran 9 Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025	79
Lampiran 10 Daftar Publikasi Berkualitas Tahun 2025	80
Lampiran 11 Hasil Evaluasi TPSS	81
Lampiran 12 Surat Hasil Penilaian SAKIP	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dan merupakan dokumentasi pertanggungjawaban kepada pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik yang sudah ditetapkan. Perwujudan visi dan misi yang telah diupayakan didasarkan pada dua sasaran kegiatan yang harus dicapai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 2025-2029. Selanjutnya sebagai upaya realisasi Renstra, pada tahun 2025 telah diselenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan terwujudnya penyediaan data dan insight statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah merealisasikannya melalui penyajian publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas dengan indikator kinerja utama persentase publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas. Selain itu, sasaran kegiatan kedua yaitu terwujudnya pembinaan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, telah diwujudkan melalui pembinaan statistik sektoral yang dilakukan selama tahun 2025 dengan indikator kinerja utama Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja utama Direktorat Statistik persentase publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas mencapai 100 persen dan capaian indikator kinerja utama tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral direktorat statistik kependudukan dan ketenagakerjaan mencapai 113,89 persen. Oleh karena itu, rata-rata capaian indikator kinerja utama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2025 adalah sebesar 106,95 persen.

Tabel 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKU 1					
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (%)	Persen	100	100	100
IKU 3					
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Poin	80,62	91,82	113,89

Untuk mencapai capaian kinerja tersebut, telah ditetapkan pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Tabel 2 Realisasi Anggaran dan Upaya Efisiensi pada Sasaran Kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Realisasi	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (%)	5.074.261.000	4.517.799.868	89,03
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	37.290.000	1.360.000	3,65
Total		5.111.551.000	4.519.159.868	88,41

Sumber : SAKTI per tanggal 31 Desember 2025

Pagu anggaran Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN dan dana hibah UNFPA sebesar Rp5.111.551.000,-. Pagu anggaran yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada kegiatan penyediaan data dan insight statistik kependudukan yang berkualitas sebesar Rp5.074.261.000,- dengan realisasi penyerapannya mencapai Rp4.517.799.868,- atau sebesar 89,03 persen. Kemudian, pagu anggaran yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada kegiatan pembinaan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp37.290.000,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp1.360.000,- atau 3,65 persen.

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Dalam menjalankan mandat tersebut, direktorat ini menyelenggarakan fungsi persiapan perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan kebijakan teknis; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja, serta pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat serta berkualitas demi mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelaraskan target kinerjanya dengan Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025-2029 dan menuangkannya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Monitoring terhadap realisasi target tersebut dilakukan secara berkala dan sistematis melalui formulir rencana aksi triwulanan. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap indikator sasaran tercapai secara optimal, yang kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk laporan kinerja tahunan sebagai potret utuh pencapaian organisasi sepanjang tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan laporan ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas untuk menyajikan laporan atas prestasi kerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Melalui laporan kinerja ini, seluruh keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan organisasi didokumentasikan secara transparan. Hal ini menjadi instrumen penting bagi manajemen untuk menilai sejauh

mana efektivitas program yang telah dijalankan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagai pengembangan dari peraturan sebelumnya). Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan kepada Deputi Bidang Statistik Sosial atas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Statistik Sosial. Direktorat ini dipimpin oleh seorang Direktur yang bertugas memastikan seluruh aktivitas statistik di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan standar kualitas data nasional. Secara struktural, kedudukan ini menegaskan peran strategis Direktorat dalam mendukung ketersediaan data sosial yang krusial bagi perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 75 peraturan tersebut, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memikul tugas utama untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Guna melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 76, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

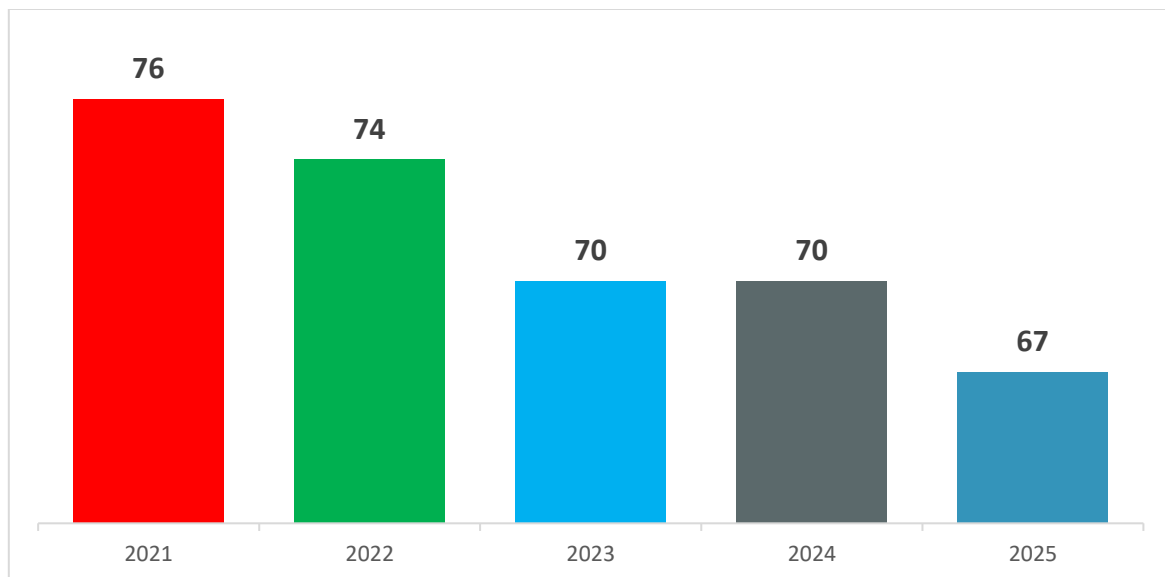
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja; serta
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan anggaran yang tersedia. Berikut dijelaskan mengenai komposisi pegawai pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

a. Komposisi Jumlah Pegawai



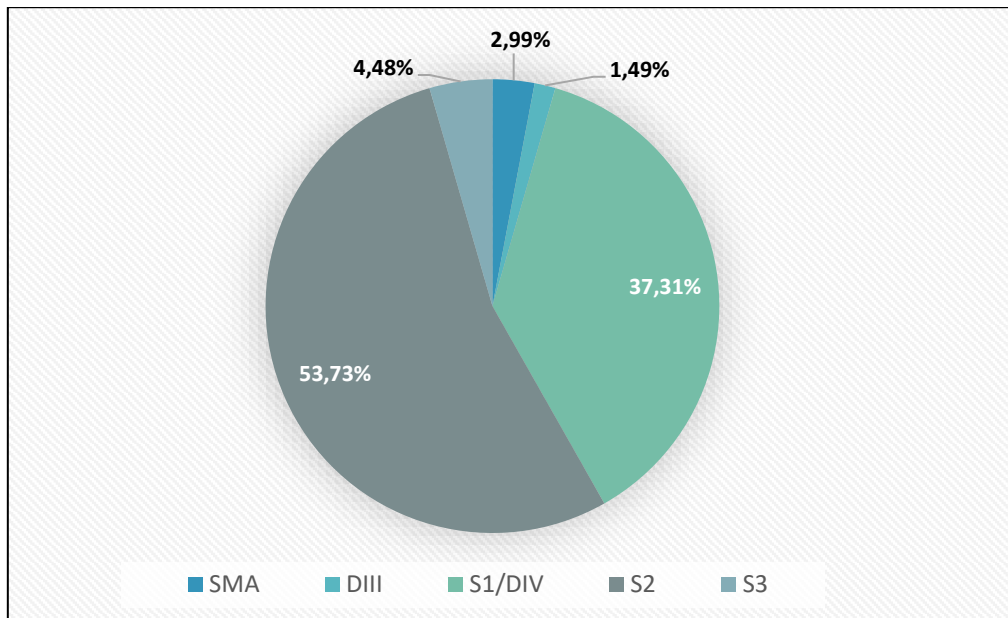
Gambar 1 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2021-2025

Berdasarkan gambar di atas, pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 adalah sebanyak 67 orang, terdapat pegawai yang keluar maupun masuk ke direktorat selama rentang tahun 2021 sampai dengan 2025.

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Kualifikasi pendidikan mencerminkan standar kompetensi akademik yang menjadi indikator esensial dalam penilaian kualitas Sumber Daya Manusia secara komprehensif. Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang (2,99 persen), Diploma III sebanyak 1 orang (1,49 persen),

Diploma IV/Strata I sebanyak 25 orang (37,31 persen), Strata II sebanyak 36 orang (53,73 persen), sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Strata III sebanyak 3 orang (4,48 persen). Persentase jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2 Persentase Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Menurut Jenjang Pendidikan, 2025

c. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Golongan

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, struktur karier PNS diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok jabatan utama, yaitu:

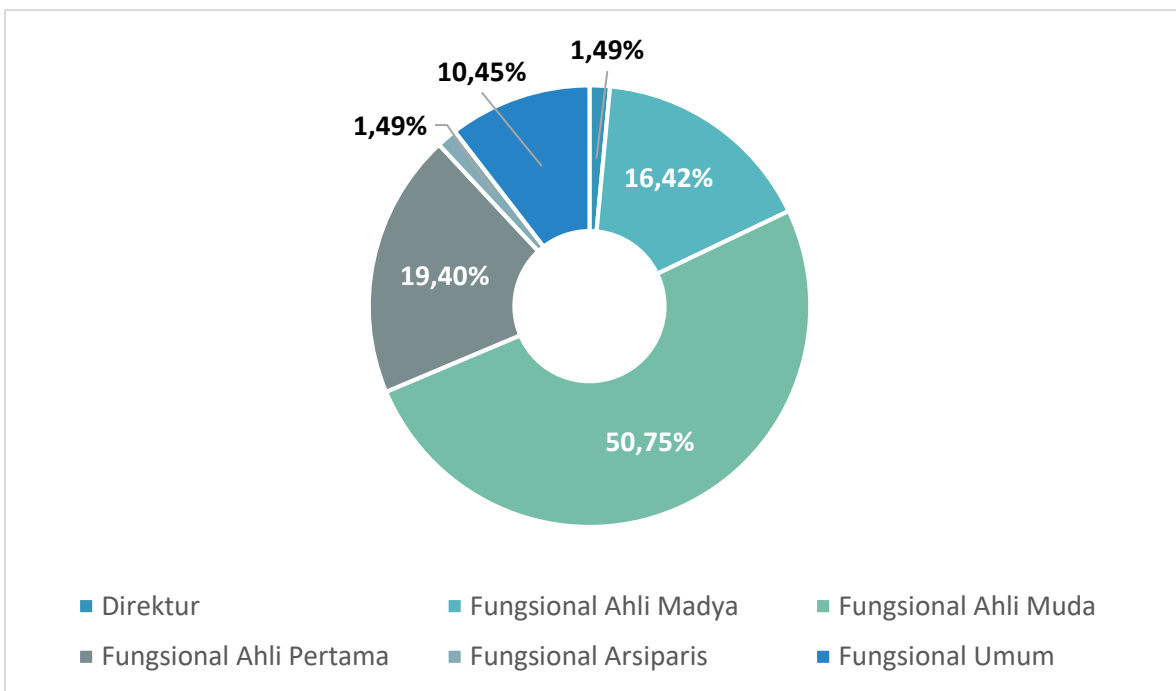
1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),
2. Jabatan Fungsional (JF), dan
3. Jabatan Administrasi (JA).

Komposisi pegawai di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2025 mencerminkan penguatan pada lini fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT): Terdapat 1 orang (1,49%) yang menduduki posisi pimpinan sebagai Direktur.

- Jabatan Fungsional (JF): Merupakan kelompok terbesar yang terdiri dari 58 orang (88,06%) Pejabat Fungsional Statistisi dan 1 orang (1,49%) Pejabat Fungsional Arsiparis.
- Jabatan Administrasi (JA): Tercatat sebanyak 7 orang (10,45%) yang menjalankan tugas pada posisi fungsional umum/pelaksana.

Khusus pada kelompok Jabatan Fungsional Statistisi yang menjadi tulang punggung kegiatan teknis direktorat, distribusi pejabat menurut jenjang jabatannya menunjukkan keberagaman tingkat keahlian. Komposisi tersebut terdiri atas Statistisi Ahli Pertama sebanyak 13 orang (19,40%), Statistisi Ahli Muda sebanyak 34 orang (50,75%), dan Statistisi Ahli Madya sebanyak 11 orang (16,42%). Struktur ini menggambarkan bahwa mayoritas kekuatan teknis berada pada jenjang Ahli Muda, yang memegang peran sentral dalam koordinasi dan analisis data kependudukan serta ketenagakerjaan. Rincian komposisi SDM berdasarkan jenis jabatan tersebut disajikan secara visual pada Gambar 3.



Gambar 3 Persentase Pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Menurut Jenis Jabatan, 2025

Sementara itu, komposisi pegawai di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan golongan pada akhir tahun 2025 didominasi oleh pegawai pada kategori golongan III (77,62 persen), sementara Pegawai pada kategori Golongan IV berjumlah jauh lebih sedikit (22,39%), dengan rincian berikut:

- Golongan III/a (Penata Muda): Terdapat 3 orang pegawai (4,48%).
- Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I): Terdapat 14 orang pegawai (20,90%).
- Golongan III/c (Penata): Terdapat 11 orang pegawai (16,42%).
- Golongan III/d (Penata Tingkat I): Merupakan kelompok dengan jumlah personel terbanyak di seluruh direktorat, yaitu 24 orang (35,82%).
- Golongan IV/a (Pembina): Terdapat 7 orang pegawai (10,45%).
- Golongan IV/b (Pembina Tingkat I): Terdapat 6 orang pegawai (8,96%).
- Golongan IV/c (Pembina Utama Muda): Terdapat 1 orang pegawai (1,49%).
- Golongan IV/d (Pembina Utama Madya): Terdapat 1 orang pegawai (1,49%).

d. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan disediakan dukungan anggaran. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025, total anggaran untuk program/kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 32.574.470.000,00. Selama tahun 2025, terdapat penyesuaian anggaran sehingga nilai pagu mengalami perubahan. Pembiayaan kegiatan pada tahun 2025 bersumber dari 2 (dua) hal yaitu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri). Pembiayaan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2.452.310.000,00 dan anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp 2.659.241.000,00. Secara keseluruhan nilai pagu total anggaran dari kedua sumber anggaran adalah sebesar Rp 5.111.551.000,00.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Sesuai dengan visi Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju serta misi memperkuat Sistem Statistik Nasional, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam penyediaan, pengembangan, dan diseminasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut adalah potensi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan :

1. Penguatan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam integrasi data

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mengoptimalkan sinergi dengan K/L melalui pemanfaatan dan pengembangan data administratif, khususnya

statistik hayati dan migrasi internasional, sehingga mampu meningkatkan kelengkapan, konsistensi, dan keberlanjutan penyediaan data kependudukan dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan juga menjalin kerjasama dengan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) dalam melaksanakan Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara. Selain itu, telah dilaksanakan inisiasi *Statistical Population Register* (SPR) dengan Kementerian/Lembaga mitra.

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital

Pengalaman dalam penerapan moda CAPI, pengolahan data terintegrasi, serta pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan survei menjadi modal penting untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas data, sekaligus mendukung pengendalian kualitas secara *real time* pada tahun 2025.

3. Pelaksanaan survei strategis nasional sebagai sumber data utama yang mutakhir dan relevan

Penyelenggaraan Sakernas secara rutin dan SUPAS 2025 menjadi potensi kunci dalam menyediakan gambaran terkini dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan, serta mendukung evaluasi indikator pembangunan, perumusan kebijakan, dan penyusunan proyeksi penduduk nasional dan daerah. Pelaksanaan SUPAS2025 juga menjadi potensi dalam penyediaan indikator kependudukan yang paling mutakhir, serta pelaksanaan PPIKN yang dalam menyediakan gambaran kependudukan Ibu Kota Nusantara.

4. Dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dan iklim kerja yang kondusif

Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dengan berbagai kualifikasi pendidikan hingga pasca sarjana dengan komposisi lebih dari 50 persen. Komposisi fungsional statistisi yang relatif memadai, berpengalaman, serta didukung hubungan kerja yang harmonis menjadi potensi internal yang kuat dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan statistik strategis dan peningkatan kualitas layanan data pada tahun 2025.

5. Keterlibatan dalam forum internasional

Partisipasi aktif dalam berbagai forum statistik internasional juga terus dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas, adopsi praktik terbaik global, serta penguatan

peran statistik Indonesia di tingkat internasional. Beberapa kegiatan yang diikuti antara lain keikutsertaan dalam kegiatan *Theory and Practices in Official Statistics for Monitoring Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh JICA dan UN-SIAP (Jepang); menghadiri *International Forum on Migration Statistics* oleh UNSD, Swedia; *The Third Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific (3MCCRVS)* oleh ESCAP di Thailand; *Technical Workshop: Time, People, Places, and Relationships - A New Lens to Organize Social and Demographic Statistics Outcomes* oleh UNSD-Statistics Canada di Kanada; *1st Workshop on Population Statistics* oleh KISI di Korea Selatan; *International Workshop on Cultural Statistics* oleh UNSD di Cina; *Workshop "Getting Everyone in the Picture - How the Health Sector Accelerated Improvements in Civil Registration and Vital Statistics (CVRS) (2015-2024)"* oleh WHO di Thailand, dan sebagainya.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat strategis maupun operasional. Berikut adalah tantangan dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan:

1. Pelaksanaan kegiatan pendataan berskala besar secara bersamaan
Pelaksanaan SUPAS 2025 yang berlangsung beriringan dengan Sakernas serta kegiatan pendataan penduduk Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan tantangan dalam pengaturan jadwal, alokasi petugas lapangan, dan pengendalian kualitas, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia.
2. Tingginya beban koordinasi pusat dan daerah
Kompleksitas kegiatan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan pada tahun 2025 menuntut intensitas koordinasi yang tinggi antara pusat dan daerah, baik dalam perencanaan teknis, pelaksanaan lapangan, maupun pengendalian dan validasi data.
3. Beban pekerjaan administrasi dan non-teknis pada fungsional statistisi
Keterlibatan fungsional statistisi dalam pekerjaan administrasi dan non-teknis masih cukup tinggi, sehingga berpotensi mengurangi fokus dan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan inti statistik kependudukan dan ketenagakerjaan.

4. Respon serta ketersediaan data dari Kementerian/Lembaga mitra sebagai penyedia data yang terlambat dari jadwal sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut.
5. Kendala dan hambatan pada kegiatan lapangan
Keterbatasan serta perbedaan kapasitas dan pengalaman petugas, serta kondisi operasional lapangan berpotensi memengaruhi konsistensi kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan statistik.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Selaras dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan Latar Belakang; Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran; Potensi dan Permasalahan; serta Sistematika Penyajian Laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, dan target kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029; Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025; Dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja direktorat statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 2025; perkembangan capaian kinerja terhadap target renstra; perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; Prestasi dan Inovasi yang dicapai di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; serta Realisasi dan Efisiensi Anggaran tahun 2025.

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi BPS

Visi Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029, visi yang ditetapkan adalah "**Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini merupakan komitmen strategis BPS dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Sehingga untuk mendukung visi BPS tersebut, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai salah satu unit kerja di BPS pun harus berperan aktif dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional di bidang statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berbasis data. Namun sampai dengan LAKIN disusun, visi di seluruh level unit kerja di Badan Pusat Statistik belum bisa ditetapkan.

Misi Badan Pusat Statistik

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dapat

terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun, sampai dengan LAKIN disusun, misi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan seluruh level unit kerja di Badan Pusat Statistik belum bisa ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 2025-2029

Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Sasaran kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang mencerminkan hasil (output) dari program dan kegiatan pada direktorat ini. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan yang merujuk pada Renstra 2025-2029 dirumuskan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas dan Insight yang Relevan	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas
	Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Menjadi Statistik Resmi
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Merujuk pada tabel 2.1, Tujuan 1 Sasaran Kegiatan 2 yaitu tersedianya data 5 sasaran visi IE dan 45 IUP Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan belum dapat dipenuhi karena ketiadaan anggaran untuk mendukung terwujudnya sasaran kegiatan ini dan tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dengan demikian, pada tahun 2025 hanya terdapat dua sasaran strategis yang terukur yaitu sasaran strategis kegiatan 1 dan strategis kegiatan 3 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah menetapkan target strategis yang harus dipenuhi pada periode 2025 melalui dokumen Perjanjian Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029. Target yang ditetapkan tersebut menjadi tolok ukur indikator kinerja utama yang akan dievaluasi pada akhir tahun, yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi hingga akhir tahun 2025 terhadap target yang telah disepakati.

Capaian target ini merupakan ukuran keberhasilan Direktorat dalam menjalankan tugas sebagai unit kerja lembaga pemerintahan, khususnya dalam menyediakan data dan insight statistik untuk mendukung transformasi nasional. Dalam kerangka tahun 2025, pemenuhan target kinerja ini juga mencerminkan kontribusi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terhadap sasaran strategis BPS dalam memperkuat Sistem Statistik Nasional dan menyediakan *insight* data yang relevan bagi perumusan kebijakan publik. Berikut pada tabel 2.2 rincian Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
IKU 1			
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas (%)	Persen	100
IKU 3			
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Poin	80,62

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 untuk mendukung sasaran kegiatan pertama yaitu terwujudnya penyediaan data dan insight statistik kependudukan yang berkualitas. Indikator ini diukur melalui persentase publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas, dengan satuan persen dan target sebesar 100 persen pada tahun 2025. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan seluruh publikasi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas statistik BPS, baik dari aspek metodologi, ketepatan waktu, konsistensi, maupun relevansi informasi bagi pengguna data.

Sementara itu, IKU 3 berkaitan dengan upaya mewujudkan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga/mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Indikator yang digunakan adalah tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral, yang diukur dalam satuan poin dengan target sebesar 80,62 pada tahun 2025. Capaian indikator ini menggambarkan peran Direktorat dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya pada domain kependudukan dan ketenagakerjaan, sejalan dengan upaya penguatan Sistem Statistik Nasional.

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

2.4.1. Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai pembina pada 6 (enam) Kementerian/Lembaga, yaitu: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

2.4.2. Prioritas Presiden

2.4.1.1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis

data terpadu yang digunakan untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi, termasuk penargetan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Penyusunan DTSEN dilaksanakan melalui integrasi dan pemutakhiran berbagai sumber data sosial ekonomi sesuai dengan standar statistik dan prinsip Satu Data Indonesia.

Badan Pusat Statistik berperan sebagai pembina, koordinator, dan penyedia statistik dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Peran tersebut dilaksanakan melalui penyusunan metodologi dan standar data, integrasi serta pemutakhiran data sosial ekonomi, serta pengendalian kualitas data guna menjamin akurasi, keterpaduan, dan konsistensi DTSEN sebagai dasar perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi.

Dalam penyelenggaraan DTSEN, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan berperan sebagai pengampu substansi ketenagakerjaan dan karakteristik penduduk usia kerja, sekaligus berkontribusi aktif dalam koordinasi teknis, harmonisasi variabel, serta penjaminan kualitas dan keberlanjutan pemutakhiran data melalui mekanisme kerja sama antar-kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Tim Pelaksana dan Sekretariat DTSEN. Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 546 Tahun 2025 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN dan Keputusan Kepala BPS Nomor 547 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menjalankan peran strategis dalam mendukung penyusunan, pepadanan, serta pengelolaan DTSEN Tahun 2025, khususnya pada dimensi kependudukan dan ketenagakerjaan.

Sejalan dengan mandat tersebut, sepanjang tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah memfasilitasi dan mendukung berbagai kegiatan pepadanan DTSEN dengan sumber data dari K/L mitra yang telah memiliki PKS dengan BPS. Kegiatan tersebut meliputi pepadanan data ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (antara lain data IWKLP, TKM, dan TKMP), pepadanan data pekerja migran dari Kementerian P2MI/BP2MI, pepadanan data kepemiluan dari KPU (DPT, TPS, dan wilayah pemilu), serta pepadanan data kependudukan spesifik dari Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk verifikasi

data untuk pembaruan DTSEN secara periodik (triwulanan) dengan cakupan peristiwa demografi seperti kelahiran baru, reaktivasi, dan penonaktifan. Selain itu, pemadanan juga dilakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui data BSU, serta koordinasi administrasi penyerahan data DTSEN triwulanan dengan Kemenko PM sesuai koridor penugasan administratif. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan peran aktif Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam memastikan DTSEN 2025 tersusun secara komprehensif, mutakhir, dan relevan sebagai basis data terpadu untuk mendukung perumusan kebijakan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

2.4.2.2 Makan Bergizi Gratis (MBG)

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan turut mendukung dalam pelaksanaan survei khusus monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (SK-MBG) Tahap I dan II melalui keterlibatan pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pengolahan hasil. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan sebagai Instruktur Utama dan Instruktur Nasional dalam Pelatihan SK-MBG untuk memastikan keseragaman pemahaman konsep, metodologi, serta standar kualitas pengumpulan data. Selain itu, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan turut berperan sebagai anggota tim manajemen lapangan yang mengawal pelaksanaan pendataan agar berjalan sesuai pedoman, serta sebagai anggota tim analisis yang bertanggung jawab dalam pengolahan, validasi, dan cleaning data guna menjamin akurasi dan konsistensi hasil survei.

2.4.3. Isu Strategis Nasional: Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Pusat Pemerintahan Baru

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru merupakan isu strategis nasional yang memerlukan dukungan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dalam rangka mendukung perencanaan, pembangunan, dan pemantauan perkembangan IKN, BPS berperan dalam penyediaan data dasar dan indikator statistik yang menggambarkan kondisi demografi, sosial, ekonomi, serta lingkungan di wilayah IKN dan daerah penyangga.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral dan lintas sektor, termasuk data kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan, infrastruktur, dan perekonomian wilayah. BPS juga berperan dalam penguatan integrasi data dan penerapan standar statistik nasional untuk memastikan keterbandingan dan konsistensi data sebagai dasar perumusan kebijakan terkait pembangunan IKN. Selain itu, BPS mendukung pengembangan IKN melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi statistik, termasuk pemutakhiran data berbasis wilayah kecil dan penguatan sistem data spasial, guna menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan penyediaan data dasar dan indikator statistik yang menggambarkan kondisi demografi, sosial, ekonomi, serta lingkungan di wilayah IKN, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan berperan dalam Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) serta penyusunan publikasinya.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan pada sub bab 1.2, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan didukung oleh dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri). Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan pada tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025-2029. Anggaran Keuangan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencapai kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta pengelolaan anggaran tersebut telah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran BPS Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan		Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)		32.574.470.000	5.111.551.000
	2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	32.574.470.000	2.452.310.000
	00238 Population Dynamics Data and Analysis (UNFPA)*	-	2.659.241.000

Pagu anggaran Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp32.574.470.000, sementara pagu yang dapat digunakan sebesar Rp5.111.551.000 bersumber dari APBN sebesar Rp2.452.310.000 dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) atau dana hibah UNFPA sebesar Rp2.659.241.000. Perbedaan antara pagu total dan pagu yang dapat digunakan tersebut disebabkan oleh penerapan kebijakan *self blocking* anggaran sebagai bagian dari upaya pengendalian dan efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan secara optimal pada tahun berjalan.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

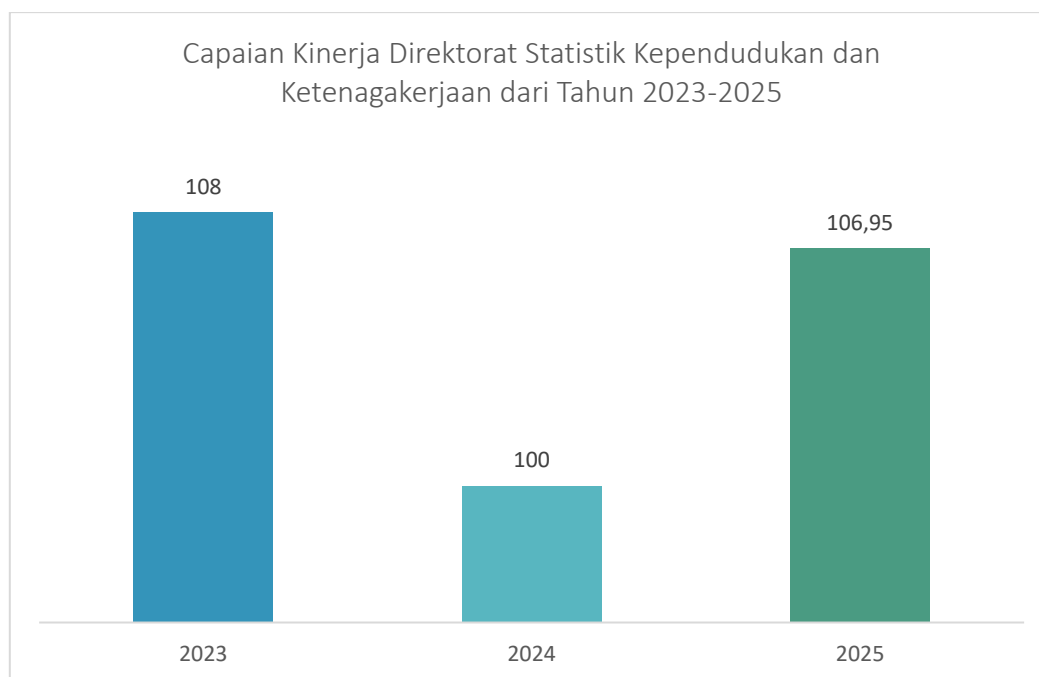
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan realisasi kinerja yang secara umum berjalan selaras dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Total Selama 2023-2025

Perbandingan capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dari Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023-2025 (persen)

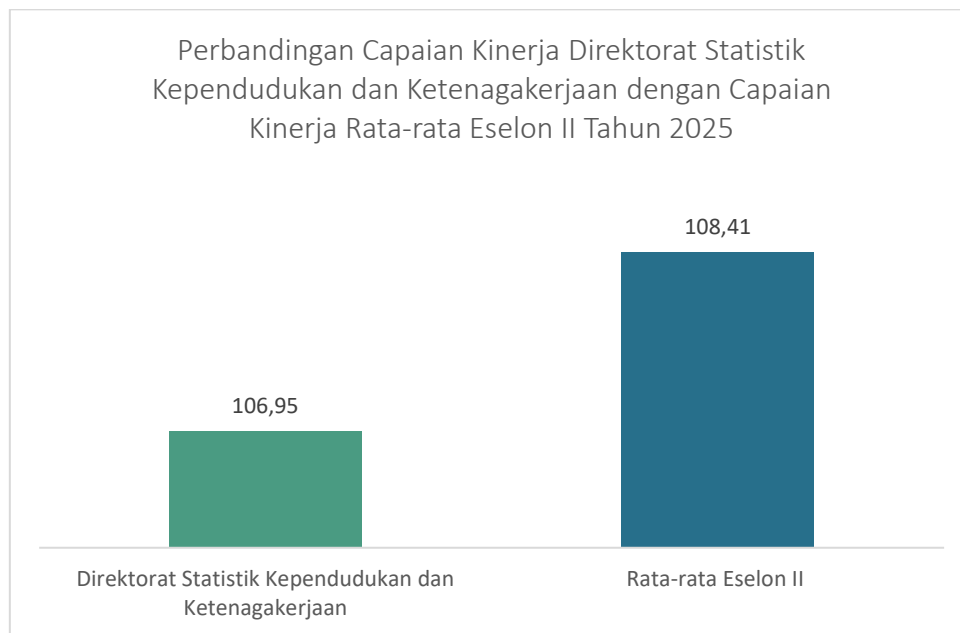
Dalam satu tahun pelaksanaan kinerja Tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 106,95 persen, yang menandakan keberhasilan Direktorat dalam melampaui target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam memenuhi indikator kinerja publikasi dan laporan statistik

Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas, serta keberhasilan dalam mencapai target tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral. Dengan hasil tersebut, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mampu menjaga konsistensi kinerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik secara keseluruhan. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang berada pada angka 100 persen, serta tetap berada pada level kinerja yang tinggi dan relatif stabil dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 108 persen. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas Direktorat dalam mencapai indikator kinerja publikasi dan laporan statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas, sekaligus keberhasilan dalam memenuhi target tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan konsistensi dan keberlanjutan kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik.

b. Penjelasan Nilai PKO 2025

Berdasarkan klasifikasi Predikat Kinerja Organisasi (PKO), nilai PKO Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar 94,5 berada pada rentang $80\% < X \leq 100\%$, sehingga termasuk dalam predikat "BAIK." Predikat Baik mengindikasikan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah terlaksana dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi. Capaian nilai PKO 94,5 ini mencerminkan konsistensi organisasi dalam menghasilkan data dan insight statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas, serta keberhasilan dalam pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga mitra. Dengan predikat Baik, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang solid, andal, dan dapat diandalkan dalam mendukung penyediaan data strategis bagi pembangunan nasional, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja menuju predikat yang lebih tinggi di masa mendatang.

c. Benchmarking Capaian Kinerja terhadap Rata-rata



Gambar 5 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dengan Rata-rata Capaian Direktorat di Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Berdasarkan Gambar 5, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki kinerja yang relatif sejalan dengan rata-rata capaian kinerja seluruh Direktorat pada ke deputian sosial (Eselon II). Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi dan mulai melaksanakan sejumlah upaya perbaikan kinerja sebagai bagian dari rencana tindak lanjut berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja berbasis hasil, peningkatan efisiensi dan kualitas proses bisnis statistik melalui transformasi digital, serta optimalisasi koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program strategis;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemantauan kinerja secara berkala terus dilakukan untuk memastikan perbaikan kinerja dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata pada peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya;
3. Tingginya capaian pada IKU pembinaan statistik sektoral mencerminkan efektivitas pelaksanaan pendampingan, koordinasi, dan sinergi dengan kementerian/lembaga mitra dalam penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya pada bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Upaya penguatan standardisasi data,

peningkatan pemahaman terhadap prinsip Satu Data Indonesia, serta optimalisasi peran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam pembinaan statistik sektoral selama Tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.

d. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Evaluasi peningkatan kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dilakukan dengan membedah perbandingan antara target, realisasi, serta capaian akhir selama periode 2023 hingga 2025. Penjabaran lebih mendalam mengenai perkembangan performa tahunan tersebut dapat dicermati pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025 ¹⁾	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100			
Sasaran 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan										
Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Menjadi Statistik Resmi	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)		N/A (Belum dijadikan indikator)		N/A (Belum dijadikan indikator)		N/A (Belum dijadikan indikator)		
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan										
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	80,62	N/A (Belum dijadikan indikator)	91,82	N/A (Belum dijadikan indikator)	113,89			

¹⁾ Sumber : Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat dua sasaran dan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang merupakan sasaran dan indikator dan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025. Direktorat Statistik Kependudukan dan

Ketenagakerjaan memfokuskan kinerjanya pada dua sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan pertama, yaitu Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas, diukur melalui IKU Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas; pada indikator ini, realisasi berhasil mencapai target tepat sebesar 100 persen sehingga diperoleh nilai capaian kinerja 100%. Untuk sasaran kegiatan kedua yaitu Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, yang pada tahun ini belum ditetapkan sebagai sasaran kegiatan yang tercantum secara formal dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Sasaran kegiatan ketiga, yakni Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, diukur melalui IKU Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang pada implementasinya realisasi hingga Triwulan IV 2025 berhasil mencapai angka 91,82 poin dari target sebesar 80,62 poin, yang menghasilkan persentase capaian kinerja sangat tinggi sebesar 113,89%. Mengingat kedua sasaran dan indikator tersebut baru mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan belum menjadi bagian dari parameter penilaian pada tahun 2023 hingga 2024, maka seluruh data target, realisasi, dan capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

e. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 per IKU Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berikut adalah analisis dalam Capaian Kinerja per IKU Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025.

1. IKU 1: Persentase Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas

Salah satu upaya Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam mendukung pembangunan adalah dengan menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan publikasi dan laporan statistik yang berkualitas. Komitmen ini kemudian

dirumuskan ke dalam salah satu indikator kinerja utama, yaitu “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas.”. Publikasi atau laporan dinyatakan berkualitas apabila bersumber dari kegiatan statistik yang memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data serta Indeks Aspek Pemanfaatan Data dengan kategori minimal Baik, yaitu dengan nilai indeks sebesar $\geq 2,6$. Terdapat empat belas (14) publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas dengan satu tambahan publikasi yaitu Booklet Sakernas Februari 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025
2. Statistik Pendapatan Februari 2025
3. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025
4. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2025
5. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan, Februari 2025
6. Booklet Sakernas Februari 2025 (Tambahan)
7. Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2024
8. Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
9. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2024
10. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia Tahun 2024
11. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025
12. Statistik Pendapatan Agustus 2025
13. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2025
14. Indikator Pasar Tenaga Kerja di Indonesia Agustus 2025
15. Berita Resmi Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2025

Meskipun semua publikasi/laporan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi dalam penyusunannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas Tahun 2025 menurut Monitoring Capaian Kinerja per Triwulan

Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Triwulan I		
<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahap pengumpulan data lapangan SAKERNAS Februari 2025, di beberapa wilayah terjadi bencana banjir, cuaca buruk, serta terputusnya jaringan internet. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemutakhiran dan pendataan sampel tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyusunan publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025, Statistik Pendapatan Februari 2025, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025, Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2025, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2025, serta Booklet Sakernas Februari 2025. • Pada penyusunan publikasi Analisis Mobilitas Tenaga Kerja (AMTK) Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2024, terdapat perbedaan output indikator yang dihasilkan akibat ketidaksesuaian syntax pembentuk variabel dalam proses pengolahan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan perpanjangan jadwal pemutakhiran dan pendataan SAKERNAS Februari 2025. Dengan penyesuaian jadwal tersebut, seluruh proses pengumpulan data tetap dapat diselesaikan pada minggu pertama Maret 2025 sehingga tidak menghambat tahapan penyusunan publikasi dan capaian kinerja triwulanan. • Dilakukan pemeriksaan ulang syntax pembentuk variabel pada indikator yang menghasilkan output berbeda, serta pelaksanaan olah data ulang menggunakan syntax yang telah disepakati sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan mitigasi resiko SAKERNAS • Pengolahan data ulang dengan menggunakan syntax pembentuk variabel yang sudah disepakati sesuai konsep dan definisi yang digunakan (publikasi AMTK)

Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Triwulan II		
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan publikasi Analisis Mobilitas Tenaga Kerja hasil SAKERNAS 2024, yang berpotensi memengaruhi kelancaran dan kecepatan penyelesaian tahapan publikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan optimalisasi SDM melalui penataan ulang pembagian tugas serta manajemen pengalokasian pekerjaan di dalam tim publikasi agar seluruh tahapan penyusunan dapat berjalan sesuai rencana dan target kinerja yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi SDM pada Tim Penyusun dan manajemen ulang pembagian tugas
Triwulan III		
<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2024: Sebagian surat permintaan data ke K/L belum mendapatkan balasan sesuai batas waktu (29 Agustus 2025). SDM terbatas dan berada pada musim puncak pekerjaan di tim lain, sehingga progres pengolahan data terhambat. 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta penanggung jawab K/L aktif menghubungi narahubung, tidak hanya menunggu jawaban. Penyesuaian <i>timeline</i> SMPTK dan pembagian tugas pengolahan baru setelah kegiatan lain masuk masa pemeriksaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengingatkan penanggung jawab K/L untuk lebih mengintensifkan komunikasi dengan narahubung K/L. Penyesuaian <i>timeline</i> dan optimalisasi DM.
Triwulan IV		
<ul style="list-style-type: none"> Durasi <i>cleaning raw data</i> SAKERNAS Agustus 2025 melampaui estimasi akibat kompleksitas anomali data, sehingga menggeser jadwal analisis dan diseminasi. Respon permintaan data sekunder dari K/L mitra untuk publikasi Mobilitas Penduduk belum optimal meski sudah diminta sejak triwulan sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian <i>timeline</i> dalam penyusunan publikasi. Penyesuaian jadwal rilis publikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian <i>timeline</i> penyusunan publikasi dan jadwal rilis publikasi tahun 2026 Identifikasi publikasi berkualitas tahun 2026 Persiapan penyusunan publikasi berkualitas tahun 2026

Berdasarkan kendala, solusi dan tindak lanjut yang menurut triwulan pada pada kegiatan Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 pada tabel di atas dirangkum dalam monitoring capaian renstra tahun 2025 sebagaimana terdapat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas Tahun 2025 menurut Dokumen Notula Monitoring Capaian Renstra Tahun 2025

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Sakernas Februari: Target update sampel Sakernas Februari terhambat akibat kendala force majeure (banjir dan cuaca buruk) serta gangguan infrastruktur jaringan di wilayah tertentu, yang berisiko pada validitas data lapangan. • Publikasi AMTK 2024: Ditemukan diskrepansi hasil pengolahan pada tahapan pemeriksaan data publikasi AMTK 2024 yang memerlukan proses validasi ulang secara menyeluruh. • SDM: Keterbatasan kapasitas SDM akibat pengurangan personel secara struktural (pensiun, tugas belajar) yang tidak sebanding dengan tingginya beban kerja dinamis pada tim pengolahan. • Cleaning Data: Durasi cleaning data melampaui estimasi awal akibat kompleksitas anomali data yang ditemukan pada tahap integrasi. • Data K/L Lain: Belum optimalnya kepatuhan waktu penyampaian data dari K/L mitra (eksternal), yang berdampak pada pergeseran timeline pemeriksaan publikasi dan jadwal rilis resmi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sakernas Februari: Melakukan penyesuaian jadwal lapangan secara fleksibel (rescheduling) dan optimalisasi moda pengumpulan data alternatif guna menjamin seluruh tahapan selesai pada minggu pertama Maret 2025. • Publikasi AMTK 2024: Melakukan audit syntax pembentuk variabel dan pengolahan data ulang (re-processing) untuk memastikan konsistensi dan akurasi output data. • SDM: Melakukan redistribusi beban kerja (re-plotting) antar tim dan memperkuat peran penanggung jawab K/L dalam monitoring progres secara harian (Daily Stand-up Meeting). • Data K/L Lain: Meningkatkan intensitas komunikasi melalui mekanisme early warning kepada PIC data K/L dan melakukan penyesuaian jadwal rilis publikasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

Rekomendasi tindak lanjut pada tahun 2026 berdasarkan kendala dan solusi pada tabel 3.3 di atas adalah sebagai berikut:

▷ Tindak lanjut Triwulan I 2026:

- Penyesuaian timeline penyusunan publikasi dan jadwal rilis publikasi tahun 2026
- Identifikasi publikasi berkualitas tahun 2026
- Persiapan penyusunan publikasi berkualitas tahun 2026

▷ Tindak lanjut Triwulan II-IV 2026, melakukan kegiatan penyusunan publikasi pada tahapan berupa:

- Tahapan Persiapan :
 - ✓ Penyusunan instrument/ pelatihan SAKERNAS
 - ✓ Penyusunan dummy tabel publikasi
- Pengumpulan data:
 - ✓ Pengumpulan data lapangan SAKERNAS
 - ✓ Pengumpulan data sekunder publikasi
- Pengolahan dan analisis
- Diseminasi dan evaluasi (penulisan dan rilis)

2. IKU 3: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik No B-11/03000/ES/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Lokus Pembinaan Statistik Sektoral, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai pembina Kementerian/Lembaga berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)
2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
3. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/P2MI)
4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)
5. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Meskipun kegiatan pembinaan statistik sektoral telah memperoleh capaian kinerja yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Kegiatan Pembinaan Statistik Sektorale Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menurut Monitoring Capaian Kinerja per Triwulan

Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Triwulan I		
<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kegiatan statistik sektoral untuk 2 kegiatan prioritas di 6 K/L telah lengkap, namun terdapat 2 K/L yaitu BPIP dan Kementerian Luar Negeri yang belum lengkap mengirimkan daftar identifikasi seluruh kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L. Selain itu, daftar identifikasi kegiatan statistik sektoral yang telah dikirimkan oleh keenam K/L masih terdapat ketidaksesuaian format dan ketidaktepatan isian. Keikutsertaan produsen data belum lengkap pada pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektorale Seri 2 Materi Sistem Statistik Nasional (SSN) di Kemendagri dan KP2MI/BP2MI, serta ketidakhadiran walidata dan produsen data BPIP pada Pembinaan Statistik Sektorale Seri 3 Materi Proses Bisnis Statistik (PBS). 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan <i>follow up</i> oleh PIC Tim Pembina Statistik Sektorale kepada narahubung K/L terkait, serta dilakukan evaluasi dan asistensi lanjutan terhadap hasil identifikasi kegiatan statistik sektoral agar daftar yang disampaikan sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Dilakukan rekapitulasi daftar hadir dan konfirmasi ulang kepada narahubung K/L terkait, serta koordinasi penjadwalan ulang penyampaian materi pembinaan statistik sektoral susulan agar keterwakilan walidata dan produsen data dapat terpenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> Follow Up dan Asistensi Lanjutan pada kedua K/L (Kemlu dan BPIP) yang masih belum lengkap mengirimkan identifikasi daftar seluruh kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L Asistensi PIC Tim PSS dan narahubung keenam K/L binaan terkait hasil evaluasi identifikasi kegiatan statistik sektoral di K/L masing-masing yang tepat dan sesuai format. Koordinasi dengan kedua K/L (Kemdagri dan KP2MI/BP2MI) yang masih belum lengkap perwakilan pesertanya terkait penjadwalan ulang penyampaian materi pembinaan sektoral seri ke-2 susulan. Koordinasi dengan BPIP yang belum dapat hadir terkait penjadwalan ulang penyampaian materi pembinaan sektoral seri ke-3 susulan.
Triwulan II		
<ul style="list-style-type: none"> Ketidaklengkapan peserta dari produsen data kementerian/lembaga dalam kegiatan pembinaan statistik sektoral. Untuk Kemenlu dan Kemendagri telah dilakukan pembinaan susulan pada bulan Juni, namun untuk BPIP dan KemenP2MI pembinaan statistik sektoral belum terlaksana. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral wajib susulan pada BPIP dan KemenP2MI guna memastikan keterpenuhan peserta dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pembinaan statistik sektoral wajib susulan pada BPIP dan KemenP2MI

Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Triwulan III		
<ul style="list-style-type: none"> Jadwal kegiatan sering mendadak dan bentrok antaranggota PSS dengan kegiatan lain. Koordinasi dan penjadwalan pembinaan lanjutan dengan K/L belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan kehadiran dan pembagian tugas antaranggota agar kegiatan tetap terwakili. Melakukan komunikasi intens dengan narahubung tiap K/L 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi ketersediaan jadwal antar anggota tim dan membagikan poin-poin penting hasil pembinaan melalui grup komunikasi PSS. Menetapkan jadwal bersama KL untuk pembinaan lanjutan dan evaluasi hasilnya.
Triwulan IV		
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat peningkatan permintaan pembinaan statistik sektoral tematik yang tidak direncanakan di awal (<i>ad hoc</i>) dari berbagai K/L dengan cakupan dan kebutuhan yang beragam sehingga berdampak pada: Adanya benturan jadwal yang sudah dialokasikan sebelumnya kepada tim PSS. Proses administrasi yang cenderung menumpuk di periode akhir tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Realokasi anggota tim PSS untuk melakukan pembinaan terhadap K/L Mitra dan penyelesaian administrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata. Pembinaan K/L mitra dalam persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebelum masa penilaian

Berdasarkan kendala, solusi dan tindak lanjut yang menurut triwulan pada kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral tahun 2025 pada tabel di atas dirangkum dalam monitoring capaian renstra tahun 2025 sebagaimana terdapat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menurut Dokumen Notula Monitoring Capaian Renstra 2025

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dua kegiatan statistik sektoral prioritas pada enam K/L pada prinsipnya telah terpenuhi, namun masih terdapat ketidaklengkapan dari BPIP dan Kementerian Luar Negeri dalam penyampaian daftar seluruh kegiatan statistik sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> PIC K/L dari Tim PSS berkoordinasi dengan narahubung Kementerian Luar Negeri dan BPIP terkait kelengkapan cakupan serta identifikasi daftar seluruh kegiatan statistik sektoral di masing-masing K/L.

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen daftar identifikasi yang disampaikan oleh K/L masih ditemukan ketidaksesuaian format serta ketidaktepatan pengisian, sehingga memerlukan perbaikan dan klarifikasi lebih lanjut. • Keikutsertaan walidata dan produsen data K/L mitra dalam kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral belum sepenuhnya optimal, baik pada Seri 2 (Sistem Statistik Nasional/SSN) maupun Seri 3 (Proses Bisnis Statistik /PBS). • Pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala koordinasi dan penjadwalan, antara lain jadwal yang mendadak, benturan dengan kegiatan lain, serta cakupan pembinaan di salah satu K/L mitra yang belum menjangkau seluruh unit kerja terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pembina statistik sektoral melaksanakan evaluasi terhadap hasil identifikasi kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh enam K/L binaan. • Dilakukan rekap dan konfirmasi daftar hadir Pembinaan Statistik Sektoral Seri 2 (Sistem Statistik Nasional/SSN) maupun Seri 3 (Proses Bisnis Statistik /PBS) guna memastikan kehadiran serta keterwakilan walidata dan produsen data pada K/L terkait. • Direncanakan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral susulan, disertai penyesuaian kehadiran dan pembagian tugas tim, penguatan komunikasi dengan narahubung K/L, serta pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Rekomendasi tindak lanjut pada tahun 2026 berdasarkan kendala dan solusi pada tabel 3.5 di atas adalah sebagai berikut:

▷ Tindak lanjut Triwulan I 2026:

- Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.
- Pembinaan K/L mitra dalam persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebelum masa penilaian

▷ Tindak lanjut Triwulan II-IV – 2026:

- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral 2026
- Komunikasi aktif dengan K/L mitra khususnya terkait kegiatan pembinaan adhoc oleh Tim PSS sehingga membutuhkan pengaturan jadwal

3.2 Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memiliki tiga sasaran kegiatan dengan tiga IKU sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”.
2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan IKU “Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Menjadi Statistik Resmi”.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan”.

Dari ketiga sasaran tersebut, hanya dua sasaran kegiatan yang menjadi target yang akan dicapai pada tahun 2025 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, yaitu sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 3. Ketercapaian kedua sasaran tersebut terhadap target Rencana Strategis (Renstra) disajikan pada Tabel 3.6.

Berdasarkan Tabel 3.6, capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik terhadap target Renstra. Pada Sasaran 1, yaitu terwujudnya penyediaan data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas berhasil mencapai realisasi 100 persen. Capaian ini telah sepenuhnya memenuhi target tahun 2025 dan sekaligus sejalan dengan target tahun 2029, yang menunjukkan konsistensi kualitas publikasi statistik yang dihasilkan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 ⁾	Target 2029 ⁾	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan						
Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Menjadi Statistik Resmi	Persen		100			
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan						
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Poin	80,62	90,30	91,82	113,89	101,68

⁾ Diambil dari : Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU

Pada Sasaran 3, yaitu terwujudnya pembinaan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra, capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dengan realisasi sebesar 91,82 poin, capaian ini mencapai 113,89 persen terhadap target tahun 2025 dan 101,68 persen terhadap target tahun 2029. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral berjalan sangat efektif dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas statistik sektoral K/L mitra.

Faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target kinerja secara umum antara lain semakin optimalnya pemanfaatan digitalisasi dalam proses bisnis statistik, baik pada tahap

pengumpulan dengan penerapan moda CAPI, pengolahan data terintegrasi, *dashboard monitoring* dan evaluasi pada pelaksanaan survei maupun diseminasi data. Pengalaman dalam penerapan moda CAPI, pengolahan data terintegrasi, serta pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan survei menjadi modal penting untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas data, sekaligus mendukung pengendalian kualitas secara real time pada tahun 2025. Kesemua faktor tersebut mendukung tercapainya target pada Sasaran 1, yaitu terwujudnya penyediaan data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas.

Lebih lanjut, koordinasi dan sinergi yang kuat antara unit kerja di lingkungan BPS serta dengan kementerian/lembaga mitra turut mempercepat pencapaian target pada Sasaran 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang dan terarah, juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran 3. Selain itu, pelaporan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang tepat waktu juga menjadi salah satu faktor tercapainya target pada Sasaran 3.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target kinerja pada tahun 2025 yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kendala geografis dan dinamika lapangan merupakan tantangan yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan serta berpotensi berdampak pada efektivitas dan ketepatan waktu pengumpulan data.
2. Adanya kompleksitas anomali pada raw data menyebabkan proses *cleaning* data melampaui estimasi waktu yang direncanakan, sehingga berdampak pada penyesuaian jadwal analisis dan diseminasi hasil.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam tim penyusunan publikasi berkualitas berpotensi memengaruhi kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian setiap tahapan kerja. Selain itu, adanya beban kerja ganda, khususnya pada periode puncak kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, turut menyebabkan perlambatan progres pencapaian tahapan kinerja.
4. Respon yang belum optimal dari Kementerian/Lembaga mitra dalam penyampaian data sekunder, khususnya yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah

ditetapkan, berpotensi menghambat kelancaran proses pengolahan, analisis, dan penyusunan publikasi.

5. Pekerjaan Ad Hoc yang bersifat mendadak dan kerap berbenturan dengan agenda tim, serta lonjakan permintaan pembinaan statistik sektoral di luar rencana kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun, menyebabkan penumpukan beban administrasi dan memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

Secara keseluruhan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala, capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan berada pada jalur yang selaras dengan target Renstra 2029.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

3.3.1. Output yang Dihasilkan menurut Prioritas

3.3.1.1 Output Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional. Selama ini BPS telah banyak melakukan pembinaan, baik kepada kementerian/lembaga, perangkat daerah, instansi swasta, akademisi, maupun masyarakat lainnya. Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada enam kementerian/lembaga, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Output Pembinaan statistik yang dilaksanakan meliputi:

1. Pembinaan statistik baik yang dilakukan dalam internal BPS maupun eksternal BPS
2. Upaya pembinaan statistik meliputi:
 - o Peningkatan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan statistik secara internal melalui

1. Internalisasi Pelaksanaan PSS 2025 kepada anggota tim pembina statistik sektoral
 2. Kickoff Meeting Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang diikuti oleh Tim Pembina dan Walidata Kementerian/lembaga
 3. Internalisasi Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral yang diikuti oleh tim pembina
 4. Internalisasi Aplikasi dan Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral yang diikuti oleh tim pembina
 5. Internalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diikuti oleh tim pembina
 6. Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan Statistik Sektoral 2025 yang diikuti oleh tim pembina
- Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik di kementerian/Lembaga binaan
 1. Pembahasan Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral di 6 K/L binaan
 2. Pembinaan Prinsip Satu Data Indonesia untuk 6 K/L binaan
 3. Pembinaan Sistem Statistik Nasional untuk 6 K/L binaan
 4. Pembinaan Proses Bisnis Statistik untuk 6 K/L binaan
 5. Pembinaan Kualitas Data untuk 6 K/L binaan
 6. Pembinaan Kelembagaan untuk 6 K/L binaan
 7. Lokakarya Penyusunan Metadata, Perumusan Rekomendasi kegiatan Statistik, dan Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sosial di Kementerian Luar Negeri
 - Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik
 1. Fasilitasi pelatihan Statistika Dasar dan Sektoral bagi Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (PID) Kementerian Luar Negeri
 2. Pembahasan kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BKKBN dan Badan Pusat Statistik mengenai Mekanisme Pertukaran Data

3. Rapat Penguatan Koordinasi Statistik Sektoral di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kemendukbangga/BKKBN
5. Fasilitasi Forum Satu Data Kementerian Luar Negeri: Arah Strategis Pengembangan Ekosistem Big Data Kementerian Luar Negeri
6. Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral dan Persiapan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (EPSS) 2026
7. Pembinaan Pengolahan dan Penyajian Data Kementerian Luar Negeri
8. Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Satu Data Indonesia dan Peningkatan Tata Kelola Data di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
9. Narasumber Forum Satu Data Jilid II dan Sosialisasi EPSS di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
10. Narasumber pada Rapat Koordinasi Pengolahan dan Analisis Hasil Pendataan Lengkap Gastrodiplomasi Indonesia Kementerian Luar Negeri
11. Narasumber pada Forum Satu Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
12. Fasilitasi Kegiatan Public Hearing Pengembangan Survei Citra Indonesia sebagai Narasumber
13. Indikator Pembangunan Prioritas Nasional: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada RPJMN 2025-2029 Kementerian Luar Negeri

3.3.1.2 Output Prioritas Presiden

A. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Visi Presiden 2025–2029, *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*, menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan fondasi pembangunan sebelumnya guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Visi ini diwujudkan melalui delapan Asta Cita yang mencakup 17 program prioritas dan Quick Wins lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur. Berikut tujuh belas (17) agenda prioritas presiden yang dimaksud adalah:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan air.
2. Peyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, Sains dan Teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke Petani.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan Rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota Inovatif-karakteristik-mnaidir lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian Seni Budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa KL seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS

Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)–Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu Duknaker juga menyediakan hasil survei untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembaruan DTSEN di tahun 2025, antara lain Sakernas Februari 2025, Sakernas Agustus 2025, dan Supas 2025.

- Kemenaker: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari kemenaker untuk dipadankan dengan DTSEN.
- BP2MI: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari BP2MI untuk dipadankan dengan DTSEN.
- KPU: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari KPU untuk dipadankan dengan DTSEN.
- Kemendukbangga: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari Kemendukbangga untuk dipadankan dengan DTSEN.e
- BPJS Ketenagakerjaan: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dipadankan dengan DTSEN.
- Dukcapil-Kemendagri: melakukan koordinasi terkait verifikasi data NIK untuk pembaruan DTSEN untuk dipadankan dengan data SIAK Dukcapil.

B. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kontribusi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) menghasilkan berbagai output strategis yang mendukung penyediaan data dan informasi bagi pengambilan kebijakan. Output tersebut meliputi penyusunan buku pedoman pelaksanaan survei sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan, ketersediaan raw data hasil pendataan yang telah melalui proses *cleaning* untuk menjamin kualitas dan konsistensi data, serta laporan supervisi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga turut berperan dalam menghasilkan tabulasi dan penyajian tabel-tabel analitis yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai dasar pemantauan dan perumusan tindak lanjut program MBG.

3.3.1.3 Output Isu Strategis Nasional

Secara umum, terdapat beberapa output yang dihasilkan BPS dalam mendukung isu strategis nasional yaitu:

1. Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang statistik Kegiatan Sensus Ekonomi informasi yang menghasilkan indikator : struktur ekonomi, informasi karakteristik usaha dan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
2. Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) output yang dihasilkan: Notulensi rapat/diskusi,dataset inventori GRK Indonesia 2019-2023, Indikator inti berupa intensitas emisi GRK. Publikasi resmi BPS: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019-2023 (Rilis Juni 2025)
3. Perpres No.7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 61 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas Dan Perpres No. 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, output yang dihasilkan: Data Komoditas pangan yang meliputi gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan dan bawang putih.
4. Sensus Ekonomi output yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah instrumen dan proses bisnis pendataan lapangan yang siap digunakan untuk pelaksanaan SE2026.
5. Dari isu terkini salah satu aktivitas yang dilakukan adalah IKN sebagai pusat pemerintahan baru maka perlu dirumuskan kebijakan dalam rangka penyediaan data dan indikator untuk wilayah IKN dan merumuskan kebijakan dalam penyediaan indikator untuk penyajian wilayah kecil (small area estimation). Sedangkan output yang dihasilkan adalah penggunaan CAPI dan penggunaan Mobile Positioning Data (MPD).

Termasuk didalam tugas dan fungsi pekerjaan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terkait isu strategis nasional yaitu Pelaksanaan Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) pada tahun 2025 sesuai dengan Nota Kesepahaman OIKN dan BPS Nomor 005/MoU/OIKN-BPS/VI/2025 dan Nomor 33/HK.610/NK/07/2025 Tanggal 3 Juni 2025 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dengan output sebagai berikut:

- Tersedianya data penduduk secara lengkap pada wilayah Otorita Ibukota Nusantara beserta karakteristik demografinya.
- Tersedianya data dan indikator kependudukan.
- Tersedianya geotagging rumah tangga untuk intervensi kebijakan secara langsung.

- Tersedianya frame untuk survei strategis yang akan menghasilkan indikator wilayah IKN.

3.3.2. Kendala, Solusi, dan Rencana tindak lanjut per prioritas

A. Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Kendala:

Pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala koordinasi dan penjadwalan, serta cakupan pembinaan di salah satu K/L mitra yang belum menjangkau seluruh unit kerja terkait.

Solusi:

Direncanakan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral disertai penyesuaian kehadiran dan pembagian tugas tim, penguatan komunikasi dengan narahubung K/L, serta pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Rencana Tindak Lanjut:

Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.

B. Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Prioritas Presiden Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN):

Kendala

- Pada tahap awal pembentukan dan pelaksanaan DTSEN, belum terdapat pembagian peran dan penugasan yang jelas antar unit kerja di lingkungan BPS, khususnya terkait penanggung jawab koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) mitra, sehingga koordinasi pemadanan data berpotensi berjalan kurang optimal.
- Banyaknya K/L mitra serta beragamnya jenis dan karakteristik data sosial ekonomi yang dipadankan (ketenagakerjaan, kependudukan, kepemiluan, dan administrasi kependudukan) menuntut koordinasi intensif, yang pada awalnya terkendala belum adanya PIC yang secara khusus mengawal proses pemadanan dan verifikasi data DTSEN.

Solusi:

- Adanya kebijakan pembagian penugasan PIC per K/L mitra DTSEN guna memperjelas peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial.
- Penetapan PIC tersebut diikuti dengan penguatan koordinasi teknis antar unit kerja dan K/L mitra, sehingga proses pemadanan data, verifikasi, serta integrasi DTSEN dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Tindak Lanjut:

- Masing-masing PIC yang telah ditetapkan mengawal seluruh rangkaian kegiatan DTSEN sesuai pembagian K/L, mulai dari koordinasi penyerahan data, pemadanan, verifikasi, hingga pembaruan DTSEN secara periodik.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terus mendukung keberlanjutan pemutakhiran DTSEN melalui penguatan peran PIC, pemanfaatan hasil survei (Sakernas dan Supas), serta koordinasi rutin dengan K/L mitra guna menjamin kualitas, konsistensi, dan kemutakhiran data DTSEN.

C. Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Isu Strategis Nasional Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN):

Kendala

- Wilayah pendataan sulit dijangkau karena kondisi geografis dan pembangunan yang masih berlangsung.
- Tingginya mobilitas pekerja konstruksi serta jadwal kerja yang padat menyulitkan proses pendataan.
- Tantangan dalam menjaga konsistensi dan keterbandingan data PPIKN dengan Sakernas dan Susenas.

Solusi:

- Petugas pendataan direkrut dari desa/lokasi yang sama sehingga lebih memahami kondisi wilayah dan memudahkan akses ke rumah tangga sasaran.
- Pendataan dilakukan pada waktu tertentu yang lebih memungkinkan, seperti malam hari atau hari libur, agar responden dapat ditemui.
- Dilakukan evaluasi dan cleaning data untuk mengidentifikasi anomali, serta cross-check ke lapangan guna memastikan kesesuaian dan kualitas data.

Tindak Lanjut:

- Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan sumber daya lokal untuk mendukung keseluruhan kegiatan lapangan.
- Dengan adanya data dasar PPIKN, maka dapat dipantau perkembangan atau perubahannya sehingga data anomali dapat diminimalisir
- Dalam keadaan tertentu untuk mencakup responden tertentu akan disusun mekanisme yang mengakomodir ketersediaan waktu respon

3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Prestasi yang berhasil diraih oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan kecakapan Sumber Daya Manusia yang telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai upaya meningkatkan kinerja direktorat dan kinerja BPS. Selama tahun 2025 prestasi yang berhasil diperoleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh piagam penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang berhasil mendapatkan nilai 4,20 pada domain Kualitas Data, dan nilai 3,67 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik sehingga Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan Berkualitas berdasarkan hasil Tim Penilai Statistik Berkualitas BPS.
2. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh piagam penghargaan dalam pengelolaan arsip di lingkup unit kerja dengan berhasil mendapatkan nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 86,138 dengan Kategori A (Memuaskan).
3. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan secara nyata aktif ikut mewujudkan “Satu Data Indonesia” sesuai amanat Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia melalui kegiatan “Satu Data Migrasi Internasional” yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga.
4. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menginisiasi kegiatan pengembangan Sistem Statistik Hayati Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil

(Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan capaian yang diamanatkan pada Perpres 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

5. Perpres Statistik Hayati masuk dalam Program Penyusunan Perpres 2026: Masuknya Perpres Statistik Hayati dalam Program Penyusunan Perpres 2026 merupakan prestasi strategis karena mengangkat statistik menjadi agenda kebijakan nasional serta menegaskan BPS sebagai leading sector dalam pengelolaan statistik hayati yang bersumber dari pencatatan sipil. Hal ini bermakna:

- Pengakuan politik dan kebijakan tingkat nasional terhadap statistik sebagai agenda strategis, bukan sekadar isu teknis
- Penegasan peran BPS sebagai leading sector dalam koordinasi dan integrasi statistik lintas K/L
- Penguatan interoperabilitas dan integritas data nasional, khususnya antara data statistik dan data administrasi
- Kepastian hukum pemanfaatan dokumen pencatatan sipil sebagai sumber statistik resmi
- Fondasi regulasi jangka panjang bagi penyediaan statistik hayati yang berkualitas, berkala, dan dapat dipercaya.

Sepanjang tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan inovasi dalam hal Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan kegiatan Duknaker Sharing (D'Ring) secara *online* dimana narasumbernya adalah pegawai yang baru saja menyelesaikan Tugas Belajarnya (Pasca Sarjana) dan *sharing* mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaiaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Duknaker Sharing #01 berjudul "Internalisasi Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektor" oleh narasumber Yogo Aryo Jatmiko, Monica Windi Triasturi, dan Hamim Tsalis Soblia tanggal 16 Januari 2025.
2. Duknaker Sharing #02 berjudul "*Sosialisasi Manajemen Risiko*" oleh narasumber dari Tim Inspektorat BPS RI pada tanggal 30 Januari 2025.

3. Duknaker Sharing #09 berjudul “Pendugaan Area Kecil Model Sub-area Twofold dalam Pendugaan Proporsi Komuter Tingkat Kabupaten/Kota di Sepuluh Wilayah Metropolitan” oleh narasumber Yudi Fathul Amin tanggal 23 Juni 2025.
4. Duknaker Sharing #10 berjudul “Cerita Hasil Refleksi Duknaker 2025” tanggal oleh Tim Kesekretariatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tanggal 14 November 2025.
5. Dalam hal penerapan standar internasional, Tim Sakernas 2025 sudah menerapkan pengukuran indikator ketenagakerjaan berdasarkan International Conference Labour Statistician (ICLS) ke-19, 20, dan 21 yang terakhir mulai Sakernas Februari 2025. Sepanjang 2025, sudah dilakukan serangkaian diskusi untuk penyiapan sintaks penyusun dari ketiga standar terbaru tersebut namun hasilnya masih belum dipublikasikan.
6. Dalam hal pengembangan statistik ketenagakerjaan, Tim Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan juga telah melakukan kajian pengukuran indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru berdasarkan ICLS ke-17 yang kemudian akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sebagai tindak lanjut permintaan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru tersebut akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sudah mulai disusun namun belum dipublikasikan. Dalam pemanfaatan hasil kajian tersebut, indikator pekerja informal ICLS ke -21 sudah mulai disosialisasikan oleh Kepala BPS saat mengunjungi ILO di Geneva dan pemerintah Indonesia. Indikator ini juga merupakan salah satu yang akan dipresentasikan oleh Kepala BPS pada Meeting of the group of experts on quality of employment, Geneva, Switzerland, 4-6 Mei 2026 yang diadakan oleh UNECE.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan didukung oleh dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri). Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan pada tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025-2029. Anggaran Keuangan Direktorat Statistik Kependudukan dan ketenagakerjaan telah disusun

secara realistis dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencapai kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran tersebut telah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan disediakan dukungan anggaran. Pembiayaan kegiatan pada tahun 2025 bersumber dari 2 (dua) hal yaitu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri). Pembiayaan yang bersumber dari APBN sebesar Rp2.452.310.000,-. Sementara anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp2.659.241.000,- telah terealisasi penggunaannya sebesar Rp2.589.264.944,- atau sebesar 97,37 persen. Secara keseluruhan nilai pagu anggaran dari kedua sumber anggaran adalah sebesar Rp 5.111.551.000,- telah terealisasi penggunaannya sebesar Rp 4.519.159.868,- atau sebesar 88,41 persen.

Realisasi dan efisiensi anggaran digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan capaian kinerja yang direncanakan. Efisiensi dihitung sebagai perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Nilai efisiensi ≥ 1 menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai sebanding atau lebih tinggi dibandingkan anggaran yang digunakan (efisien), sedangkan nilai < 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum menghasilkan capaian kinerja yang optimal (tidak efisien).

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berhasil menghasilkan capaian kinerja yang sangat optimal dan melampaui target yang direncanakan. Secara agregat, instansi mencapai persentase capaian kinerja sebesar 106,95% dengan realisasi anggaran yang terkendali di angka 88,41%. Hal ini menghasilkan nilai efisiensi total sebesar 112,32 yang berada jauh di atas ambang batas efisiensi (≥ 1). Angka ini mengindikasikan bahwa organisasi tidak hanya mampu memenuhi janji kerjanya, tetapi juga berhasil melakukan penghematan sumber daya finansial tanpa mengorbankan kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan.

Tabel 3.7 Tabel Realisasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 Menurut Sasaran

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi**)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas.								
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas.	Persen	100	100	100	5.074.261.000	4.517.799.868	89,03	1,1232
Sasaran 2:								
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin							
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan								
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Poin	80,62	91,82	113,89	37.290.000	1.360.000	3,65	3.120,27
Total				106,95	5.111,551,000	4.519.159.868	88,41	112,32

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

**) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Jika ditinjau per sasaran, Sasaran 1 terkait Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas. menunjukkan tingkat efisiensi yang sehat sebesar 1,1232. Dengan serapan anggaran sebesar 89,03%, unit kerja mampu menuntaskan seluruh target publikasi secara penuh (100%). Keberhasilan yang serupa juga terlihat pada Sasaran 3 terkait Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

dengan capaian kinerjanya melampaui target hingga 113,89% meskipun realisasi anggarannya sangat minim, yakni hanya 3,65%. Meskipun secara kalkulasi menghasilkan angka efisiensi yang sangat tinggi, fenomena pada Sasaran 3 ini menggambarkan adanya optimalisasi sumber daya yang luar biasa atau efisiensi proses kerja yang sangat masif dalam pelaksanaan pembinaan di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran tahun 2025 dikategorikan Sangat Efisien. Keberhasilan ini mencerminkan tata kelola anggaran yang akuntabel, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan daya ungkit terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Tren positif ini menunjukkan bahwa strategi operasional yang diterapkan telah berjalan efektif, sehingga organisasi mampu mencapai kondisi *doing more with less*—menghasilkan dampak kinerja yang lebih besar dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dari pagu yang disediakan. Adapun upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 yaitu:

1. Pelatihan instruktur maupun petugas baik SAKERNAS, SUPAS, dan PPIKN dilakukan secara daring (online).
2. Pembinaan statistik sektoral terhadap K/L mitra yang sebagian dilakukan secara daring (online).
3. Sosialisasi indikator hasil survei ke daerah maupun kegiatan lain secara online.
4. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif

BAB 4

The background features a large teal shape on the left side, with several overlapping orange and light blue geometric shapes on the right side, creating a layered, 3D effect.

PENUTUP

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari capaian kinerja sasaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025. Secara total, capaian kinerja utama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2025 mencapai target yang ditentukan. Rata-rata capaian indikator kinerja utama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2025 adalah sebesar 106,95 persen. Rincian capaian kinerja setiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja utama “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas” pada tahun 2025 adalah 100 persen, dengan target sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen.
2. Capaian kinerja utama “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan” pada tahun 2025 adalah 113,89 persen, dengan target sebesar 80,62 persen dan realisasi 91,82 persen.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 telah sesuai dengan sasaran dan tujuan kinerja yang telah ditetapkan, namun masih diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja pada tahun 2026. Rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Perbaikan perencanaan dan pengendalian penyusunan publikasi statistik
Melakukan penyesuaian timeline penyusunan dan jadwal rilis publikasi melalui identifikasi publikasi berkualitas dan persiapan penyusunan publikasi secara lebih terstruktur.

2. Penyusunan timeline yang komprehensif serta perancangan strategi mitigasi risiko untuk setiap tahapan kegiatan guna mengantisipasi ketidaksesuaian jadwal pada setiap kegiatan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kapasitas (Capacity Building) dan pemantauan kinerja secara berkala terus dilakukan untuk memastikan perbaikan kinerja dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata pada peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya
4. Mengoptimalkan diseminasi produk statistik kependudukan dan ketenagakerjaan melalui pemanfaatan media sosial guna memperluas jangkauan informasi kepada publik.
5. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada K/L mitra pemahaman yang selaras kepada kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.
6. Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata; melakukan pembinaan kepada K/L mitra yang menjadi lokus serta melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan.
7. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada K/L mitra pemahaman yang selaras kepada kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral
8. Perbaikan efektivitas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral
Memperbaiki perencanaan pembinaan statistik sektoral dengan melakukan penataan prioritas K/L mitra, penyesuaian materi pembinaan, serta penyusunan rencana pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Selain itu Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral, monev, Melakukan pembinaan ke KL yang menjadi lokus pembinaan.
9. Optimalisasi koordinasi baik lintas unit kerja maupun lintas Kementerian/Lembaga dalam mendukung pelaksanaan sasaran strategis.
10. Memberikan usulan peningkatan anggaran.

The background features a large teal triangle on the left side, with an orange diagonal stripe crossing it. On the right, there are overlapping light blue and white geometric shapes that resemble folded paper or layered planes. The word 'LAMPIRAN' is centered in white text on the teal area.


LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- *Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 (Awal)*

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ali Said, MA.
Jabatan : Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

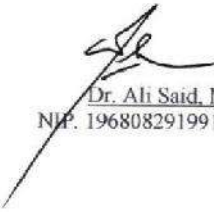
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Pihak Kedua


Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001



Dr. Ali Said, MA.
NIP. 19680829199112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase publikasi/laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	100 persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2,26 poin

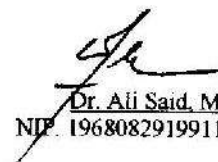
Kegiatan	Anggaran
2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp. 32.574.470.000
JUMLAH	Rp. 32.574.470.000

Deputi Bidang Statistik Sosial



Dr. Ateng Harsono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik
Kependudukan dan Ketenagakerjaan



Dr. Ali Said, MA.
NIP. 19680829199112 1 001

- Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 (Final)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ali Said, MA.
Jabatan : Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputy Bidang Statistik Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Dr. Ali Said, MA.
NIP. 19680829199112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	80,62 Poin

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp.	32.574.470.000
	Jumlah	Rp.	32.574.470.000

Deputi Bidang Statistik Sosial



Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
 NIP. 196901091992111 001

Palembang, 24 Januari 2025
 Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan



Dr. Ali Said, MA,
 NIP. 19680829199112 1 001

Lampiran 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	2,99
2	Diploma III (DIII)	1	1,49
3	Sarjana S-1/DIV	25	37,31
4	Pascasarjana Magister (S2)	36	53,73
5	Pascasarjana Doktor (S3)	3	4,48
Jumlah		67	100

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan III/a (Penata Muda)	3	4,48
2	Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I)	14	20,90
3	Golongan III/c (Penata)	11	16,42
4	Golongan III/d (Penata Tingkat I)	24	35,82
5	Golongan IV/a (Pembina)	7	10,45
6	Golongan IV/b (Pembina Tingkat I)	6	8,96
7	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1	1,49
8	Golongan IV/d (Pembina Utama Madya)	1	1,49
Jumlah		67	100

Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	1,49
2	Fungsional Statistisi Ahli Madya	11	16,42
3	Fungsional Statistisi Ahli Muda	34	50,75
4	Fungsional Statistisi Ahli Pertama	13	19,40
5	Arsiparis Mahir	1	1,49
6	Fungsional Umum	7	10,45
Jumlah		67	100

Lampiran 5 Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025

No.	Nama Instansi	Tim Pembina
(1)	(2)	(3)
1	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
6	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Lampiran 6 Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh piagam penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang berhasil mendapatkan nilai 4,20 pada domain Kualitas Data, dan nilai 3,67 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik sehingga Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan Berkualitas berdasarkan hasil Tim Penilai Statistik Berkualitas BPS.



2. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh piagam penghargaan dalam pengelolaan arsip di lingkup unit kerja dengan berhasil mendapatkan nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 86,138 dengan Kategori A (Memuaskan).



3. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan secara nyata aktif ikut mewujudkan “Satu Data Indonesia” sesuai amanat Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia melalui kegiatan “Satu Data Migrasi Internasional” yang tersebar di berbagai K/L.
4. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menginisiasi kegiatan pengembangan Sistem Statistik Hayati Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan capaian yang diamanatkan pada Perpres 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).
5. Perpres Statistik Hayati masuk dalam Program Penyusunan Perpres 2026.

Lampiran 7 Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

1. Duknaker Sharing (Dring):

- Duknaker Sharing #01 berjudul “Internalisasi Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral” oleh narasumber Yogo Aryo Jatmiko, Monica Windi Triasturi, dan Hamim Tsalis Soblia tanggal 16 Januari 2025.

 **dring!**
DUKNAKER SHARING 2025 #01

**Internalisasi Pelaksanaan
Pembinaan Statistik Sektoral**

NARASUMBER

Yogo Aryo Jatmiko, SST, M.Stat
Statistisi Ahli Muda

Monica Windi Triasturi, SST
Statistisi Ahli Muda

Hamim Tsalis Soblia, SST, M.Stat.
Statistisi Ahli Muda

**Direktorat Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan**
Badan Pusat Statistik

 Kamis, 16 Januari 2025

 08.30 - 11.30 WIB

 ID Zoom: 93303710811
Password Zoom: durenz

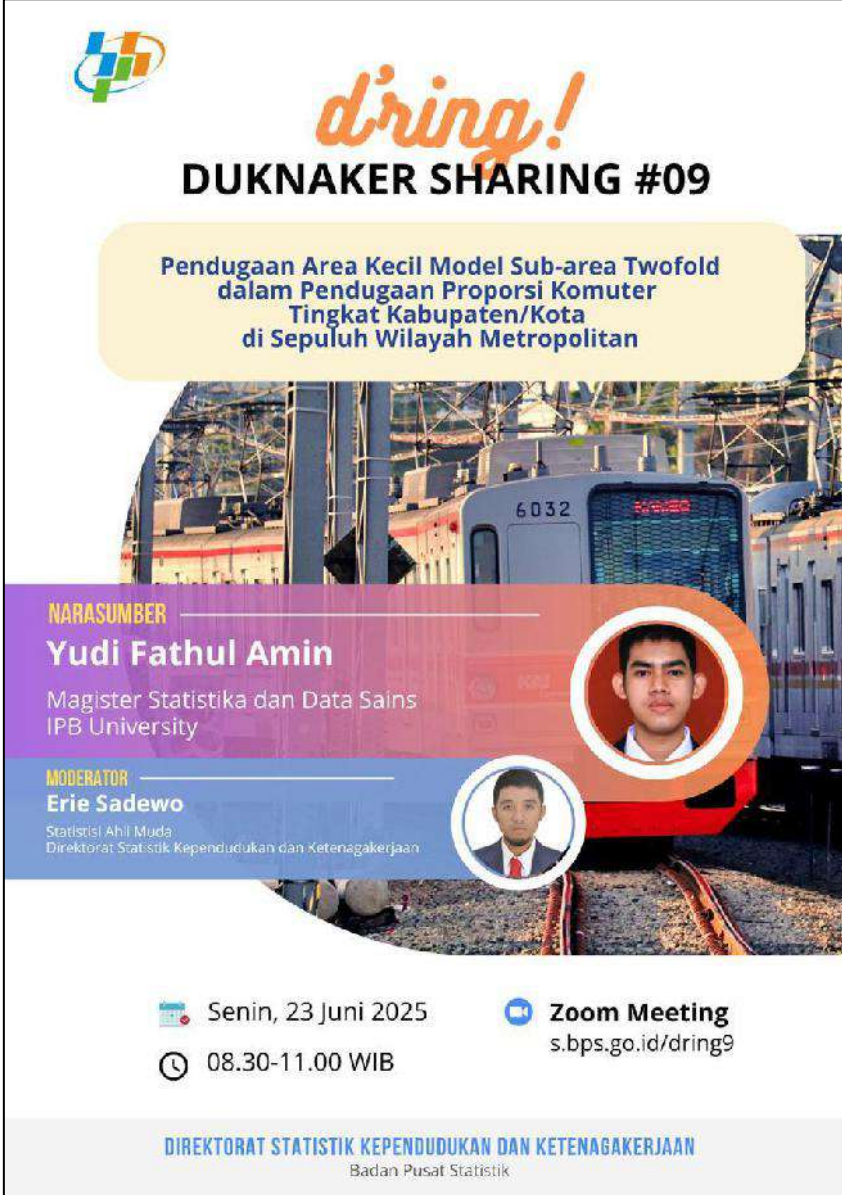
 s.id/sdm_duknaker


DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Badan Pusat Statistik

- Duknaker Sharing #02 berjudul “*Sosialisasi Manajemen Risiko*” oleh narasumber dari Tim Inspektorat BPS RI pada tanggal 30 Januari 2025.



- Duknaker Sharing #09 berjudul “Pendugaan Area Kecil Model Sub-area Twofold dalam Pendugaan Proporsi Komuter Tingkat Kabupaten/Kota si Sepuluh Wilayah Metropolitan” oleh narasumber Yudi Fathul Amin tanggal 23 Juni 2025.




dring!
DUKNAKER SHARING #09

Pendugaan Area Kecil Model Sub-area Twofold dalam Pendugaan Proporsi Komuter Tingkat Kabupaten/Kota di Sepuluh Wilayah Metropolitan

NARASUMBER
Yudi Fathul Amin
Magister Statistika dan Data Sains
IPB University

MODERATOR
Erie Sadewo
Statistisi Ahli Muda
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Senin, 23 Juni 2025
08.30-11.00 WIB

Zoom Meeting
s.bps.go.id/dring9

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Badan Pusat Statistik

- Duknaker Sharing #10 berjudul “Cerita Hasil Refleksi Duknaker 2025” tanggal oleh Tim Kesekretariatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tanggal 14 November 2025.



2. Dalam hal penerapan standar internasional, Tim Sakernas 2025 sudah menerapkan pengukuran indikator ketenagakerjaan berdasarkan International Conference Labour Statistician (ICLS) ke-19, 20, dan 21 yang mutakhir mulai Sakernas Februari 2025. Sepanjang 2025, sudah dilakukan serangkaian diskusi untuk penyiapan sintaks penyusun dari ketiga standar terbaru tersebut namun hasilnya masih belum dipublikasikan.

3. Dalam hal pengembangan statistik ketenagakerjaan, telah dilakukan kajian pengukuran indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru berdasarkan ICLS ke-17 yang kemudian akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sebagai tindak lanjut permintaan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru tersebut akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sudah mulai disusun namun belum dipublikasikan. Dalam pemanfaatan hasil kajian tersebut, indikator pekerja informal ICLS ke -21 sudah mulai disosialisasikan oleh Kepala BPS saat mengunjungi ILO di Geneva dan pemerintah Indonesia. Indikator ini juga merupakan salah satu yang akan dipresentasikan oleh Kepala BPS pada Meeting of the group of experts on quality of employment , Geneva, Switzerland, 4-6 Mei 2026 yang diadakan oleh UNECE.

Lampiran 8 Alokasi Anggaran Belanja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025

1. IKU 1: "Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Kependudukan yang Berkualitas" menggunakan anggaran dari 2 output yaitu BMA 004. Publikasi/Laporan Survei Angkatan Kerja Nasional dan BMA 005. Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025							
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item, Periode Desember 2025							
Kementerian:	054	BADAN PUSAT STATISTIK					
Unit Organisasi:	01	BADAN PUSAT STATISTIK					
Satuan Kerja:	010576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					Hal 1 dari 9
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
GG Program Penyediaan dan Pelebaran Informasi Statistik	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
GG.2005 Penyelidikan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
BK Data dan Informasi Publik	5,074,261,000	0	1,576,511,019	2,940,050,049	4,517,799,339	89.03 %	550,461,122
BMA.004 PUBLIKASIA LAPORAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	411,884,000	0	223,550,505	223,121,064	476,712,139	114.91 %	193,291,601
EE1 Ditujukan Tanpa Proses Tugas (ex-Fungsional)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EE1 PERSIAPAN	411,884,000	0	223,550,505	223,121,064	476,712,139	114.91 %	193,291,601
EE2 PENGUMPULAN DATA	497,821,000	0	592,248,152	181,856,825	1,114,306,125	84.81 %	73,815,550
EE3 PENGLANJUTAN DAN ANALISIS	37,502,000	0	17,551,763	9,644,621	23,345,794	68.40 %	11,460,216
EE4 DISEMINASIKAN HASIL HASIL	15,973,000	0	0	0	0	0.00 %	15,973,000
BMA.005 PUBLIKASIA LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	2,713,783,000	0	54,941,014	2,589,264,844	2,513,324,344	86.32 %	69,948,056
EE1 PERSIAPAN	2,839,783,000	0	24,660,000	2,589,264,844	2,513,324,344	97.21 %	75,843,056
EE2 PENGUMPULAN DATA	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EE3 PENGLANJUTAN DAN ANALISIS	25,900,000	0	0	0	0	0.00 %	25,900,000
EE4 DISEMINASIKAN HASIL HASIL	0	0	0	0	0	0.00 %	0

2. IKU 3: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025							
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item, Periode Desember 2025							
Kementerian:	054	BADAN PUSAT STATISTIK					
Unit Organisasi:	01	BADAN PUSAT STATISTIK					
Satuan Kerja:	010576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					Hal 1 dari 9
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
GG Program Penyediaan dan Pelebaran Informasi Statistik	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
GG.2005 Penyelidikan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	5,111,551,000	0	1,577,791,019	2,941,268,849	4,519,159,868	88.41 %	592,391,132
BDE Fasilitas dan Pembinaan Lapangan	37,290,000	0	850,000	810,000	1,380,000	3.65 %	35,890,000
BK1101 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	37,290,000	0	850,000	810,000	1,380,000	3.65 %	35,890,000
103 PELAKSANAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	37,290,000	0	850,000	810,000	1,380,000	3.65 %	35,890,000
103.06 TANPA SUB KOMPONEN	37,290,000	0	850,000	810,000	1,380,000	3.65 %	35,890,000
621211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000602 seminar/konferensi/meeting/filday/pembinaan statistik sektoral	0	0	0	0	0	0.00 %	0
622101 Belanja Jasa Profesi	18,250,000	0	0	0	0	0.00 %	18,250,000
000614 Honorarium/ honorarium pejabat/eselon/lyang/creator/kepala/pemilihan statistik sektoral	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
000654 Honorarium/ honorarium pejabat/ eselon/ lyang/ creator/ kepala/ pemilihan statistik sektoral	11,250,000	0	0	0	0	0.00 %	11,250,000
624113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,040,000	0	850,000	810,000	1,380,000	7.14 %	17,660,000
000683 transportasi lokal/pemilihan data/sektoral	19,040,000	0	850,000	810,000	1,380,000	7.14 %	17,660,000
624114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000684 paket meeting/filday/pemilihan data/sektoral	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000607 perjalanan/filday/pembinaan statistik sektoral	0	0	0	0	0	0.00 %	0

Lampiran 10 Daftar Publikasi Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Daftar Publikasi
	Pusat
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	1. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025
	2. Statistik Pendapatan Februari 2025
	3. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025
	4. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2025
	5. Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2024
	6. Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
	7. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2024
	8. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025
	9. Statistik Pendapatan Agustus 2025
	10. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2025
	11. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025
	12. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia Tahun 2024
	13. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan, Februari 2025
	14. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan, Agustus 2025
Tambahan	15. Booklet SAKERNAS Februari 2025

Lampiran 12 Surat Hasil Penilaian SAKIP



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sulomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857048. Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : T-234/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025

Yth. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan nilai sebesar **"73.45"** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah **"Sangat Baik"**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Plt Inspektur Wilayah I,

Eko Yuwono

Tembusan:

1. Deputi Bidang Statistik Sosial
2. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

Lampiran LHE Akuntabilitas Kinerja
Surat Nomor: T-234/08100/PW.120/LHE/2025
Tanggal 22 Desember 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja BPS untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mencampurkan file asli

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS;
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS Tahun 2025;
9. Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-46/08100/PW.110/2025, tanggal 18 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai lampiran Evaluator dan Unit Kerjanya.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai hasil akhir evaluasi atas implementasi SAKIP berupa penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja dengan kategori predikat sebagai berikut:



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mencapai file asli

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai)
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

C. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan menyesuaikan pada tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis bukti-bukti yang telah dikirimkan sesuai jangka waktu permintaan dokumen evaluasi yang ditetapkan, serta perbandingan dengan berbagai informasi kinerja pada beberapa sistem manajemen kinerja BPS.

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan (notulensi) kinerja triwulanan yang menyajikan capaian kinerja secara detail dan disertai dengan analisis faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja sehingga dapat ditentukan rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi dijabarkan secara detail dan dilengkapi pihak-pihak yang melaksanakan serta dimonitoring setiap periode triwulanan.
2. Meningkatkan penggunaan data kinerja dalam pembahasan aktivitas serta perubahan budaya organisasi melalui penggunaan Kipapp yang mengelola aktivitas kinerja untuk seluruh pegawai.
3. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan penyajian informasi yang lengkap terkait analisis dan perbandingan data capaian kinerja yang konsisten



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

dengan dokumen sumber sesuai dengan standar penyusunan Laporan Kinerja yang telah ditetapkan.

4. Memperbaiki mekanisme pengukuran kinerja melalui penyempurnaan pengelolaan data kinerja secara terperinci terkait kelengkapan dan validitas sumber data capaian kinerja.
5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun tahunan dengan memastikan bahwa target kinerja telah ditetapkan berdasarkan dasar hitung dan argumen logis yang tepat serta didukung data yang akurat, dan telah diketahui pimpinan serta pihak terkait yang terlibat dalam perencanaan kinerja.
6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja (jangka menengah) dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja BPS sesuai Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 atau sesuai periode Rencana Strategis yang akan berjalan.
7. Memperbaiki mekanisme pengelolaan data pendukung capaian kinerja, bukti rencana aksi triwulanan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan peran tim yang telah ditunjuk.

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode evaluasi sederhana/*desk evaluation*, dan evaluasi terbatas menggunakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan kriteria dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan reviu berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjutnya dilakukan reviu antar tim evaluator melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh nilai "73.45" dengan predikat "BB" yaitu "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut:



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Serifikasi Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.30	20.40
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.50	10.50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	19.75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73.10	73.45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Perencanaan Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Unit kerja telah menyusun Renstra Terbaru 2025-2029, ditandatangani Pimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.
- 3) Unit Kerja telah menetapkan PK Pimpinan Unit Kerja Tahun 2025 serta mempublikasikan pada laman PPID.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 6) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka menengah unit kerja periode sebelumnya yang ditandatangani dan dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Reviu Renstra 2020 dan Renstra 2025-2029
- 7) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka pendek lima tahun terakhir yang ditandatangani dan dipublikasikan pada laman PPID Unit Kerja dengan lengkap, yaitu Perjanjian Kinerja 2025, Perjanjian Kinerja 2024, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja 2021.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi SIMONEV (paling lambat tanggal 24 Juni untuk unit kerja pusat dan 23 April untuk unit kerja daerah).
- 2) Renstra 2025-2029 telah memuat rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang mengacu pada Perka BPS terkait IKU Tahun 2025-2029
- 3) Renstra 2025-2029 telah memuat target kinerja yang akan dicapai untuk periode 2025-2029
- 4) PK Pimpinan Unit Kerja telah mengacu pada Surat PLT Sestama B-172/02000/PR.130/2025 untuk unit kerja daerah dan No B-66/02000/PR.630/2025 untuk unit kerja pusat
- 5) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi undangan yang telah ditandatangani Pimpinan.
- 6) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap indikator Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 7) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 8) Penetapan target pada PK telah dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 9) Penetapan target PK telah memerhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya/kondisi kinerja terakhir untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (terdapat baseline 2024 khusus pada PK 2025).
- 10) Penetapan target PK telah ditetapkan secara menantang dengan memperhatikan batas minimal berdasarkan kebijakan nasional untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 11) Daftar hadir rapat pembahasan Rencana Strategis 2025-2029 telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 12) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi notulen yang telah ditandatangani Pimpinan.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

- 13) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 14) Rapat penetapan target pada PK terbaru telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
- 15) Daftar hadir rapat penetapan target pada PK terbaru telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 16) Rapat penetapan target pada PK telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 17) Unit Kerja telah memiliki dokumen penjenjangan kinerja disetiap level jabatan

c. Kondisi pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Unit Kerja telah memiliki dokumen anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
- 2) Unit Kerja telah memiliki dasar hitung revisi anggaran.
- 3) Dokumen revisi anggaran telah ditandatangani oleh PPK dan KPA (KAK/ tabel revisi POK)
- 4) Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja telah mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagaimana terlihat dalam dokumen Renstra.
- 5) Unit Kerja telah melakukan monitoring capaian Renstra 2024.
- 6) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
- 7) Daftar hadir rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 8) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 9) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menyajikan target jangka menengah tahun 2024 dengan realisasi 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

- 10) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat capaian tahun 2024 terhadap target jangka tahun 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 11) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan dalam rangka mencapai target jangka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 12) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 13) Reviu target Rencana Strategis telah dilakukan paling sedikit satu tahun sekali dan telah dilakukan identifikasi ketercapaian target akhir Renstra 2020-2024
- 14) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah ditandatangani Pimpinan
- 15) Daftar hadir rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 16) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah dilengkapi oleh notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 17) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah membahas seluruh Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 18) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan target, reviu target dan realisasi 2020-2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 19) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan status ketercapaian terhadap target akhir renstra 2024
- 20) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah memuat penjelasan yang memadai terkait analisis faktor pendukung dan penghambat ketercapaian target di setiap indikator
- 21) Target akhir Renstra 2024 untuk Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah tercapai



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

Kelemahan Komponen Perencanaan Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Kualitas rumusan hasil berdasarkan Perka IKU BPS 2025-2029 belum disusun berdasarkan Critical Succes Factor (CSF) yang memadai untuk mencapai kondisi kinerja yang ingin dicapai
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi ukuran kinerja yang SMART.
- 3) Rumusan IKU 2025-2029 belum sepenuhnya menunjukkan hubungan sebab-akibat antar level kinerja yang memadai dalam menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai
- 4) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu: Belum memuat dasar hitung dan basis data untuk iks 1.1.1.1 selama 5 tahun, berapa publikasi yang dibuat dan publikasi apa saja selama 5 tahun
- 5) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu: Belum memuat dasar hitung dan basis data untuk iks 1.1.1.1 selama 5 tahun, berapa publikasi yang dibuat dan publikasi apa saja selama 5 tahun
- 6) Penetapan SKP tahun 2025 pada aplikasi KipApp belum mencakup seluruh pegawai, yaitu sebesar 97,01%.
- 7) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat menunjukkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Kelemahan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat analisis kendala serta upaya yang telah dilakukan hingga periode 2024 pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang redaksinya tidak memuat uraian kendala, yaitu indikator 1.1.2.; 1.1.3.; 2.1.1.; dan 2.1.2.



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 2) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat batas waktu rencana tindak lanjut/rencana aksi pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun, batas waktu yang ditetapkan adalah tahun setelah target akhir Renstra, yaitu tahun 2025, bukan tahun 2024.

2. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pengukuran Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS Pasal 23 dan 24.
- 2) Telah terdapat Surat Keputusan/SK Tim SAKIP Unit Kerja.
- 3) Telah terdapat ketentuan yang jelas jika terjadi kesalahan data pada proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
- 4) Telah terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 5) Telah terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 6) SK Tim SAKIP telah memuat nama dan kedudukan dalam Tim.
- 7) SK Tim SAKIP telah mengakomodir perwakilan dari Tim Kerja Penanggungjawab IKU.
- 8) SK Tim SAKIP telah memuat uraian tugas untuk tiap kedudukan dalam Tim.
- 9) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian jangka menengah
- 10) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian triwulanan
- 11) Telah terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang up to date.
- 12) Telah terdapat penanggung jawab yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 13) Telah terdapat waktu delivery yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.

b. Kondisi kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 2) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Informasi target, realisasi, dan capaian pada seluruh indikator kinerja telah selaras antara Notulen rapat kinerja triwulan I Tahun 2025, FRA triwulan I Tahun 2025 dengan dokumen sumber/pendukung FRA triwulan I Tahun 2025
- 4) Seluruh IKS telah konsisten antara target pada PK 2025 dan FRA 2025.
- 5) Dokumentasi atas pelaksanaan Rencana aksi/RTL telah sesuai untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat informasi target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan analisis masalah/kendala setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan solusi/strategi yang telah dilakukan setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 9) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan rencana aksi/rencana tindak lanjut setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 10) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan PIC yang akan melaksanakan rencana aksi/rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 11) Unit Kerja telah mengirimkan FRA setiap triwulannya dengan tepat waktu.
- 13) Hasil pengukuran SKP bulanan dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
- 14) SKP bulanan yang berstatus dinilai telah divalidasi oleh pejabat penilai kinerja.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

- 15) Pengelolaan data kinerja telah memanfaatkan aplikasi monev.bps.go.id dan webapps.bps.go.id/kipapp, namun masih belum memadai karena belum terintegrasi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja, sehingga pemantauan atas keselarasan antara perencanaan, capaian kinerja unit kerja, dan capaian kinerja individu belum dapat dilakukan.

c. Kondisi pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) SKP bulanan telah dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian Tunjangan Kinerja meskipun belum terintegrasi secara sistem.
- 2) Rapat evaluasi capaian kinerja TW I 2025 telah dihadiri oleh sebagian besar/seluruh pegawai (minimal 80 persen dari total pegawai)
- 3) Unit kerja telah menyampaikan mekanisme reward and punishment kepada seluruh pegawai di unit kerja.
- 4) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 sudah menilai seluruh pegawai di unit kerja
- 5) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Persentase penyederhanaan struktur Organisasi BPS telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan telah dalam posisi ideal meskipun ke depannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada khususnya di Unit Kerja Pusat. Implementasi di Unit Kerja Pusat dan BPS Provinsi berupa pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPS.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi kebutuhan pegawai. Unit Kerja telah memenuhi formasi jabatan sesuai hasil analisis beban kerja (Kepka BPS Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2024 di Lingkungan BPS).
- 7) Notulen rapat pembahasan Renstra telah memuat strategi dalam Renstra BPS.
- 8) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat arah kebijakan dalam Renstra BPS.



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 9) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat aktivitas dalam Renstra BPS.
- 10) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat pembahasan anggaran dalam Renstra.
- 11) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan upaya efisiensi.
- 12) Unit kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment level tim kerja/pegawai yang telah dilegalisasi untuk Triwulan I tahun 2025
- 13) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 telah didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi
- 14) Kriteria reward and punishment Triwulan I tahun 2025 dalam kertas kerja telah menggunakan minimal 1 kriteria terkait kinerja.
- 15) Bukti reward and punishment Triwulan I tahun 2025 telah konsisten dengan kertas kerja.

Kelemahan Komponen Pengukuran Kinerja:

a. Kelemahan Pemenuhan Pengukuran Kinerja

- 1) Belum terdapat dasar hitung hingga X dan Y pada realisasi dari seluruh Indikator Kinerja pada notulen tw I 2025
- 2) Tidak terdapat Analisis dan Penjelasan terkait basis data hingga X dan Y dari realisasi di seluruh indikator kinerja pada notulen tw I 2025

b. Kelemahan Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Unit Kerja tidak melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja.
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja tidak ditandatangani Pimpinan.
- 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja belum memuat penetapan batas waktu tindak lanjut tiap Indikator Kinerja Sasaran, dengan batas akhir dari rentang waktu pelaksanaan rencana aksi/Rencana Tindak Lanjut pada triwulan berikutnya; atau ketika target tahunan sudah terealisasi 100% pada triwulan 1, batas waktu tindak lanjut dilakukan sampai tahun berikutnya, yaitu Batas waktu TL TW I 2025 untuk iks 1.1.1.1 masih ada yang tertulis di bulan agustus 2025, maksimal di tw 2 2025 yaitu juni 2025



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Ditjen Siberkreasi (DSIC), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 4) Penilaian SKP bulanan tahun 2025 pada aplikasi KipApp belum mencakup seluruh pegawai, yaitu sebesar 94,03 %.
- 5) Unit Kerja belum memiliki media pengelolaan data kinerja selain yang berasal dari ketentuan BPS Pusat.

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 2) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat informasi target dan realisasi.
- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat kesepakatan pihak yang melakukan tindak lanjut tiap IKS.
- 5) Laporan Kinerja telah disusun dan diformalkan (ditandatangani pimpinan Unit Kerja).
- 6) Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada PPID.
- 7) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 21 Februari 2025)
- 8) Laporan Kinerja 5 periode terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024) telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.

b. Kondisi kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Sistematika Laporan Kinerja telah memuat: Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup.
- 2) Laporan Kinerja telah dilengkapi tabel target kinerja jangka menengah sesuai Reviu Renstra 2020-2024.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 3) Bab II Laporan Kinerja telah memuat PK tahun 2024 dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
- 4) Laporan Kinerja telah memuat seluruh pencapaian Sasaran Strategis dan IKS sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
- 5) Informasi target pada Laporan Kinerja telah konsisten dengan PK tahun 2024.
- 6) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024.
- 7) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 yang konsisten dengan FRA Triwulan IV tahun 2024.
- 8) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 yang selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra.
- 9) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.
- 10) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2022.
- 11) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2021.
- 12) Perbandingan pada Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan analisis.
- 13) Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinerja total periode 2020-2024.
- 14) Laporan Kinerja telah memuat analisis terkait perbandingan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepan nya
- 15) Laporan Kinerja telah memuat analisis atas ketercapaian kinerja setiap IKS.
- 16) Laporan Kinerja telah memuat evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS disertai masalah/kendala dan solusi/upaya dalam upaya mencapai target kinerja.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 17) Laporan Kinerja telah memuat informasi efisiensi anggaran.
- 18) Laporan Kinerja telah memuat upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
- 19) Laporan Kinerja telah memuat nilai/kuantifikasi efisiensi yang telah dicapai hasil dari upaya yang telah dilakukan.
- 20) Bab IV Laporan Kinerja telah menjelaskan Informasi rencana perbaikan secara umum hasil kesimpulan dari pembahasan rencana aksi atau tindaklanjut yang telah dijelaskan pada Bab III.

c. Kondisi pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Telah terdapat pembagian kinerja berdasarkan matriks peran hasil Pimpinan dan Ketua Tim (JFT) tahun 2024.
- 2) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV 2024 telah menjabarkan informasi penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- 3) Laporan Kinerja telah memuat informasi realisasi anggaran keuangan tiap sasaran strategis.
- 4) Kriteria dalam kertas kerja telah menggunakan minimal 1 (satu) kriteria kinerja untuk tahun 2024.

Kelemahan Komponen Pelaporan Kinerja:

a. Kelemahan Pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Unit kerja belum melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024).
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja triwulan III tahun 2024 belum ditandatangani Pimpinan
- 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan (Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024) telah memuat pembahasan masalah/kendala serta solusi/upaya yang telah dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Sasaran (IKS). Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang redaksinya menimbulkan pemahaman seolah-olah tidak terdapat kendala, yaitu pada Notulen Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024 untuk IKSS 2.1.1 dan 2.1.2, serta pada Notulen Triwulan II Tahun 2024 untuk IKSS 1.1.2 dan 1.1.3.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (DSEK), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan (Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024) telah memuat pembahasan rencana aksi/rencana tindak lanjut pada setiap IKS. Namun, terdapat rencana tindak lanjut yang sebenarnya telah dilaksanakan pada periode capaian kinerja maupun sebelumnya. Sebagai contoh, pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 untuk IKSS 1.1.3 disebutkan pelaksanaannya pada Februari 2024, dan pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 untuk IKSS 1.1.2 dilaksanakan pada Juli 2024. Hal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai solusi yang telah dijalankan, bukan sebagai rencana tindak lanjut.
- 5) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan (Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024) telah memuat kesepakatan batas waktu tindak lanjut pada setiap IKS. Namun, masih terdapat batas waktu yang tidak sesuai dengan kriteria, yaitu:
 - a). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024, batas waktu tindak lanjut untuk IKSS 2.1.1 dan IKSS 2.1.2 ditetapkan hingga bulan Desember 2024, sedangkan kriteria batas waktu seharusnya adalah pada Triwulan II 2024.
 - b). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024, batas waktu tindak lanjut untuk IKSS 1.1.3 ditetapkan pada Triwulan I 2024, yang lebih tepat dikategorikan sebagai solusi yang telah dilaksanakan, bukan sebagai rencana tindak lanjut.
 - c). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024, batas waktu tindak lanjut untuk IKSS 1.1.2 ditetapkan pada Juli 2024, yang lebih tepat dikategorikan sebagai solusi yang telah dilaksanakan, bukan sebagai rencana tindak lanjut.

b. Kelemahan Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja telah memuat evaluasi dan analisis per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, namun belum selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra. Notulen hanya memuat informasi kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut tanpa analisis, sedangkan Laporan Kinerja memuat analisis sederhana tetapi tidak mencantumkan kendala, solusi, maupun rencana tindak lanjut.



* Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Elektronik (DSE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 2) Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinerja tahun 2024 di dalam unit kerja Eselon I, namun belum menyajikan perbandingan capaian kinerja total tahun 2024 terhadap rata-rata capaian kinerja total seluruh Eselon II Pusat pada tahun 2024.
- 3) Terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tercantum dalam Notulen Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, namun bukti dukung yang dilampirkan belum sesuai/valid, yaitu: Bukti dukung capaian TW IV 2024 untuk iks 2.1.1 belum menunjukkan minimal daftar hadir pembinaan yang dilakukan pada 6 Kementerian/Lembaga, yaitu 1. BKKBN, 2. Kementerian Dalam Negeri, 3. Kementerian Sosial, 4. Kementerian Ketenagakerjaan, 5. Kementerian Luar Negeri, 6. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 4) Terdapat inkonsistensi analisis dan evaluasi (termasuk kendala dan solusi) antara Laporan Kinerja (LAKIN) dan Notulen Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, yaitu:
 - a). Indikator 1.1.1. Dalam LAKIN tercantum kendala nomor 4, 5, 6, dan 7, namun kendala tersebut tidak terdapat dalam Notulen. Sebaliknya, pada Notulen tercantum kendala berupa “beberapa data yang diberikan oleh KL pada waktu yang dekat dengan batas akhir pengisian draf final publikasi,” yang tidak terdapat dalam LAKIN.
 - b). Indikator 1.1.2. Pada Notulen, solusi yang tertulis adalah “Pemenuhan indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan ke depan akan disesuaikan dengan perubahan program pemerintah dan rencana strategis BPS terbaru.” Namun, pada LAKIN tertulis “Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan berdiskusi dengan K/L terkait untuk menyepakati rasio kewirausahaan yang disesuaikan dengan ketersediaan data guna memenuhi indikator RPJMN.”
 - c). Indikator 1.1.3. Pada Notulen tercantum kendala berupa “Indikator SDGs telah terealisasi pada Triwulan I 2024 dan dihasilkan setahun sekali. Ke depan, apabila terdapat perubahan Metadata SDGs, penyediaan data akan disesuaikan dengan metadata terbaru.” Namun, pada LAKIN tertulis “Terdapat perubahan konsep pekerja anak sesuai Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II Tahun 2023, sehingga data tahun 2023 perlu dihitung menggunakan konsep baru.” d). Indikator



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (DSEI), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

2.1.1 dan 2.1.2. Pada Notulen, kendala dan solusi tidak tercantum karena indikator dinyatakan tercapai. Namun, pada LAKIN tetap tercantum kendala dan solusi.

- 5) Bab III Laporan Kinerja belum memuat informasi rencana perbaikan ke depan pada setiap indikator yang selaras dengan notulen FRA triwulan IV 2024 atau monitoring capaian Renstra 2024

c. Kelemahan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 belum dihadiri seluruh/sebagian besar pegawai.
- 2) Terdapat beberapa indikator kinerja yang rencana tindak lanjutnya tertulis dalam Notulen Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, namun tidak dilampirkan bukti dukung, yaitu IKSS 1.1.2 dan IKSS 1.1.3.
- 3) Unit Kerja belum memiliki mekanisme reward and punishment yang telah dilegalikan pada level tim/pegawai untuk tahun 2024
- 4) Reward and punishment tahun 2024 belum didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi
- 5) Bukti pelaksanaan reward tahun 2024 belum dapat diverifikasi konsistensinya dengan kertas kerja, karena tidak didukung oleh kertas kerja.
- 6) Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan persentase pegawai pada Unit Kerja telah menyusun SKP Penilaian 2024 pada Aplikasi KipApp sebesar 95,77%.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berupa Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan BPS, Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS 2025, dan Surat Edaran Inspektur Utama BPS Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP BPS 2025



* Dokumen ini telah dimanfaatkan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Balai Statistik Elektronik (BSE), BSSN.
* Pihak Anda diharapkan untuk memperhatikan file.pdf

- 2) Telah terdapat Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP, berupa SOP Evaluasi AKIP untuk Unit Kerja BPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 3) Evaluasi AKIP dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
 - 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan oleh Tim Evaluator dalam bentuk gugus tugas.
 - 5) LHE AKIP pada Unit Kerja telah dilegalisasi oleh Inspektur.
 - 6) LHE AKIP yang dilegalisasi Inspektur telah disampaikan kepada Unit Kerja.
 - 7) Evaluasi AKIP Unit Kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen yang dibangun oleh Koordinator Evaluasi Pusat.
 - 8) Pemberitahuan Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah telah dilakukan melalui Surat Inspektur Utama B-13/08000/PW.110/2025 tanggal 26 Mei 2025
 - 9) Unit Kerja telah memenuhi dokumen evaluasi AKIP dengan lengkap dan tepat waktu
 - 10) Unit Kerja telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.
 - 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 3 periode terakhir (2022, 2023, 2024) dilaksanakan secara konsisten (terjadi peningkatan nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir)
- b. Kondisi kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar waktu.
 - 2) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar anggaran.
 - 3) Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi AKIP.
 - 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan dengan mekanisme reviu berjenjang dari Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta reviu tingkat 2 dalam bentuk panel antar Tim.



* Dokumen ini telah diunggah secara terbuka di www.bps.go.id menggunakan serangkaian standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Publik (BKP), BSSN
 * Untuk lebih lanjut, kunjungi www.bps.go.id untuk informasi lebih lanjut

- 5) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan entry meeting pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
 - 6) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
 - 7) Pengisian Kertas Kerja Implementasi SAKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Tim SAKIP Unit Kerja/Operator Unit Kerja.
 - 8) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan: instrumen evaluasi yang komprehensif; LHE telah memuat penjelasan kelemahan pada tiap kriteria beserta rekomendasi yang spesifik pada aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan; telah terdapat kerangka logis pelaksanaan evaluasi AKIP; ketersediaan anggaran untuk pendalaman evaluasi; dan telah dilakukan panelisasi hasil evaluasi antar Unit Kerja yang dievaluasi.
 - 9) Tim Evaluasi AKIP telah melakukan monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi evaluasi AKIP Unit Kerja tahun 2024 dan melaksanakan Evaluasi tahun 2025.
 - 10) Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 telah disahkan oleh pimpinan APIP secara tepat waktu.
 - 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi, yaitu aplikasi SINERGI dan berbasis web yang dapat diakses melalui sinergi.web.bps.go.id.
- c. Kondisi pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Seluruh tindak lanjut rekomendasi LHE 2024 telah sesuai.
 - 2) Unit kerja telah dapat mencapai target kinerja pada triwulan I 2025 dengan total capaian kinerja sebesar minimal 100%
 - 3) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan terdapat peningkatan hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Data Signifansi Elektronik (DSrE), DSSN
* Untuk kode QR di samping untuk menyalin file ini.

- 5) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM dari (Tim Penilai Internal BPS/Tim Penilai Eksternal) dengan Kategori C (telah melakukan Pencanangan ZI)
- 6) Unit kerja telah mendapatkan penghargaan yang terkait dengan kinerja pada periode Juli 2024 s.d. Juni 2025, yaitu Internal - Sestama – 26 September 2024 - Tim Pembina Statistik Sektoral Terbaik 2024 Kategori K/L Pusat Internal

Kelemahan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: -

F. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dengan menyempurnakan notulen penetapan target Renstra melalui penambahan dasar hitung yang sistematis, basis data pendukung yang valid, dan alasan logis yang komprehensif untuk setiap target [1.2.4.1]
2. Meningkatkan kualitas monitoring kinerja strategis dengan menyempurnakan notula monitoring capaian Renstra 2025 melalui penambahan analisis capaian yang akurat, kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas [1.3.2.1]
3. Memperbaiki mekanisme pengukuran kinerja dengan menyempurnakan notula TW I 2026 melalui penambahan dasar hitung yang sistematis dan basis data yang valid untuk setiap indikator yang memiliki target dan realisasi. [2.1.10.1]
4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja triwulanan dengan menyempurnakan notula TW I 2026 melalui penambahan analisis kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman yang telah ditetapkan [2.2.10.1]



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN
* Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

5. Memperbaiki kualitas dokumentasi evaluasi kinerja dengan merevisi notula TW II, III, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang akurat, kendala yang komprehensif, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman. [3.1.17.1]
6. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyempurnakan Lakin 2025 agar memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Biro Perencanaan melalui gap analysis, revisi sistematis, dan implementasi template standar sehingga laporan kinerja dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif dan informatif [3.2.21.1]
7. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif berupa dokumentasi foto, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [3.3.19.1]
8. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2025 sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [3.3.20.1]

Selanjutnya bukti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinerja periode Tahun 2026.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja:

1. Eko Yuwono, SAB, M.M. (Pengendali Teknis)
197106041994031003
2. Herry Purdiyanto, SST, M.Ak (Ketua Tim)
197607131999031002
3. Ezra Priska Donny Anggoro, SST, M.M. (Anggota Tim)
199306222016021001



* Dokumen ini telah diontas dengan secara elektronik menggunakan perangkat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN
* Untuk lebih detail atau informasi untuk melakukan verifikasi.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Tel : +62-21-3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : +62-213857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id